

RENCANA OPERASIONAL 2021 - 2026

TUJUAN STRATEGIS-1									
Memelihara reputasi dan meningkatkan akuntabilitas PMI sebagai organisasi kemanusiaan di tingkat nasional maupun internasional.									
NO	INDIKATOR	URAIAN INDIKATOR	TARGET	TARGET PELAKSANAAN KEGIATAN					
				2021 7 Bulan	2022	2023	2024	2025	2026 4 Bulan
Outcome 1.1:									
Pemahaman personil PMI dan pemangku kepentingan eksternal tentang prinsip-prinsip dan nilai-nilai kemanusiaan dalam kebijakan organisasi dan program/kegiatan kepalangmerahan meningkat.									
1	Unit kerja diseminasi PMI Pusat, Provinsi dan Kab/Kota berfungsi dengan baik	Adalah PMI Prov, Kab/Kota dan Pusat dengan kriteria: <ul style="list-style-type: none">Mengimplementasi kebijakan diseminasi sesuai Juklak/Juknis diseminasi yang diterbitkan oleh PMI PusatMemiliki Pengurus/Staf berkompetensi diseminasiMemiliki focal point diseminasiMemiliki rencana kegiatan diseminasiMengalokasikan dana untuk diseminasi <u>Kalkulasi:</u> Jumlah unit kerja diseminasi PMI disemua tingkatan yang memenuhi kriteria per uraian indikator	1 Provinsi dan 35 PMI Kab/Kota Se Jawa Tengah	15	15	6			
2	% responden yang disurvei oleh PMI Pusat yang memberi umpan balik positif	Responden yang berasal dari lingkungan internal PMI dan eksternal (stakeholder). Memberi umpan balik positif adalah responden yang: <ul style="list-style-type: none">Mengirim kembali lembar survey yang sudah diisi secara lengkapMengenal dan mengetahui PMI secara umumMemberikan saran tentang perbaikan kinerja PMI <u>Kalkulasi:</u> Jumlah responden dengan umpan balik positif berbanding dengan total responden yang mengirim kembali lembar survey.	100%						
Output 1.1.1:									
Perundang-undangan kepalangmerahan didiseminasikan dan disosialisasikan ke semua pemangku kepentingan terkait									
3	Jumlah PMI Prov/Kab-Kota dan Pusat yang melaksanakan sosialisasi per- UU-an, diplomasi kemanusiaan kepalangmerahan dan diseminasi HHI	Kegiatan sosialisasi adalah kegiatan yang dilakukan PMI dalam bentuk seminar, lokakarya dan kegiatan lainnya yang bertujuan untuk menyebarluaskan pemahaman tentang peraturan perundang- undangan kepalangmerahan Diplomasi kemanusiaan upaya menghimbau para pembuat keputusan dan pemimpin opini untuk bertindak, setiap saat, demi kepentingan orang-orang yang rentan, dan dengan penuh penghormatan terhadap prinsip-prinsip dasar kemanusiaan dan sesuai dengan isu-isu kemanusiaan global terkini (merujuk pada Strategi 2030)	1 Propinsi dan 35 PMI Kab/Kota Se Jawa Tengah	7	24	5			

TUJUAN STRATEGIS-1									
Memelihara reputasi dan meningkatkan akuntabilitas PMI sebagai organisasi kemanusiaan di tingkat nasional maupun internasional.									
NO	INDIKATOR	URAIAN INDIKATOR	TARGET	TARGET PELAKSANAAN KEGIATAN					
				2021 7 Bulan	2022	2023	2024	2025	2026 4 Bulan
		HHI (hukum humaniter internasional) batang tubuh hukum yang mencakup Konvensi Jenewa dan Konvensi Den Haag beserta perjanjian-perjanjian, yurisprudensi, dan hukum kebiasaan internasional yang mengikutinya. HHI menetapkan perilaku dan tanggung jawab negara-negara yang berperang, negara-negara netral, dan individu-individu yang terlibat peperangan, yaitu terhadap satu sama lain dan terhadap orang-orang sipil (tidak bersenjata, bukan pihak yang terlibat perang) yang dilindungi. <u>Kalkulasi:</u> Cukup jelas							
4	Jumlah peserta lembaga-lembaga yang memperoleh sosialisasi perundang-undangan dan diplomasi kemanusiaan kepalangmerahan	Adalah peserta lembaga yang menghadiri seminar, lokakarya dan kegiatan lainnya yang bertujuan untuk menyebarluaskan pemahaman tentang peraturan perundang-undangan kepalangmerahan dan orang/pejabat pengambil keputusan yang berkompeten terhadap isu-isu kemanusiaan <u>Kalkulasi:</u> Total peserta dari semua lembaga yang menjadi sasaran sosialisasi perundang-undang kepalangmerahan.	500	50	100	100	100	100	50
Output 1.1.2.									
Media Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) Diseminasi Kepalangmerahan dan Diplomasi Kemanusiaan yang diperbarui tersedia secara memadai di setiap tingkatan.									
5	Jumlah media KIE Diseminasi Kepalangmerahan yang didistribusikan oleh PMI Pusat/Prov/ Kab/Kota.	Media KIE Diseminasi Kepalangmerahan adalah media komunikasi, informasi, dan edukasi cetak/elektronik yang dikembangkan secara khusus oleh PMI Pusat untuk mendiseminasikan nilai-nilai kepalangmerahan. <u>Kalkulasi:</u> Jumlah materi KIE diseminasi kepalangmerahan yang diproduksi untuk didistribusikan kepada stakeholder/kelompok sasaran diseminasi	18000	1000	4000	4000	4000	4000	1000
6	Jumlah lembaga yang memperoleh materi KIE diseminasi ke-PM- an	Adalah lembaga sasaran diseminasi seperti sekolah, lembaga pemerintahan relevan, organisasi sipil masyarakat, lembaga TNI/Polri yang menerima seperangkat materi KIE diseminasi dan mendistribusikannya di lingkungan masing-masing. <u>Kalkulasi:</u> Jumlah materi KIE diseminasi kepalangmerahan yang diterima oleh stakeholder/kelompok sasaran diseminasi	20	3 lembaga	4 lembaga	4 lembaga	3 lembaga	3 lembaga	3 lembaga

TUJUAN STRATEGIS-1									
Memelihara reputasi dan meningkatkan akuntabilitas PMI sebagai organisasi kemanusiaan di tingkat nasional maupun internasional.									
NO	INDIKATOR	URAIAN INDIKATOR	TARGET	TARGET PELAKSANAAN KEGIATAN					
				2021 7 Bulan	2022	2023	2024	2025	2026 4 Bulan
Output 1.1.3.									
Diseminasi nilai-nilai kemanusiaan dan kepalangmerahan dilaksanakan oleh diseminator PMI yang kompeten di semua tingkatan									
7	Jumlah diseminator HHI di PMI Provinsi/ Kab/Kota.	Diseminator adalah personil PMI yang telah lulus pelatihan diseminasi Kepalangmerahan, HHI dan memiliki sertifikat Pelatih/Fasilitator ke-PM-an Kalkulasi: Total diseminator PMI yang memperoleh sertifikasi kelulusan yang diterbitkan oleh PMI Pusat	70	10	20	10	10	10	10
8	Jumlah diseminator PMI Prov/Kab- Kota yang dimobilisasi untuk kegiatan diseminasi kepalangmerahan	Diseminator PMI Prov/Kab-Kota yang ditugaskan oleh induk organisasinya untuk melakukan kegiatan diseminasi di wilayah kerja masing-masing. Kalkulasi: Jumlah diseminator yang memfasilitasi kegiatan diseminasi yang diinisiasi oleh PMI Pusat/Prov/Kab- Kota. Seorang diseminator dihitung sebagai satu orang walaupun memfasilitasi kegiatan diseminasi lebih dari satu kali.	20	3	3	3	3	4	4
Output 1.1.4.									
Kerja sama dengan institusi terkait (TNI, Polri, universitas, sekolah, LSM) dan masyarakat terjaln untuk mendiseminasikan nilai-nilai kemanusiaan dan kepalangmerahan.									
9	Jumlah Mitra yang bekerjasama dengan PMI di bidang diseminasi kepalangmerahan	Mitra diseminasi PMI adalah lembaga TNI/Polri, Perguruan Tinggi, Sekolah Dasar/Menengah, lembaga Non-Pemerintah, Organisasi Sipil Masyarakat yang memiliki rencana menyelenggarakan kegiatan diseminasi nilai-nilai kepalangmerahan dan Hukum Perikemanusiaan Internasional. Kalkulasi: Total organisasi induk Mitra PMI dalam bidang diseminasi kepalangmerahan yang dicatat oleh PMI Provinsi	25	5	5	5	5	5	
10	Jumlah kegiatan diseminasi yang dilaksanakan Mitra bersama dengan PMI Prov/ Kab/Kota bersama mitra.	Kegiatan diseminasi Kepalangmerahan yang dilakukan dengan oleh PMI Prov/Kab-Kota dan Pusat bekerjasama dengan Mitra terkait. Kalkulasi: Total jumlah kegiatan diseminasi kepalangmerahan yang dilaksanakan oleh PMI Provinsi, Kab/Kota se Jateng	11 Event	1	2	2	2	2	2

TUJUAN STRATEGIS-1									
Memelihara reputasi dan meningkatkan akuntabilitas PMI sebagai organisasi kemanusiaan di tingkat nasional maupun internasional.									
NO	INDIKATOR	URAIAN INDIKATOR	TARGET	TARGET PELAKSANAAN KEGIATAN					
				2021 7 Bulan	2022	2023	2024	2025	2026 4 Bulan
Outcome 1.2:									
Jangkauan, kualitas, intensitas dan ketersediaan dokumentasi, publikasi, promosi, dan advokasi kegiatan/pelayanan PMI meningkat.									
11	% Berita tentang organisasi dan kegiatan PMI Provinsi, Kab/Kota yang dikategorikan bersifat positif.	Berita positif PMI adalah pemberitaan yang dipublikasikan oleh media massa (elektronik dan cetak) yang isinya menyatakan sesuatu yang positif mengenai kegiatan layanan PMI <u>Kalkulasi:</u> Jumlah berita positif yang diterima berbanding jumlah berita yang dikompilasi setiap bulannya	35 PMI Kab/Kota Se Jawa Tengah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Output 1.2.1:									
Kapasitas staf kehumasan meningkat dengan dilengkapi perangkat dasar kehumasan, media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) tersedia secara memadai di PMI semua tingkatan.									
12	Jumlah staf Humas PMI Pusat, Prov/Kab- Kota yang memperoleh pelatihan kehumasan	Staf Markas PMI Prov/Kab-Kota dan Pusat penanggungjawab kegiatan kehumasan yang memperoleh pelatihan teknis kehumasan, baik secara internal maupun eksternal <u>Kalkulasi:</u> Total jumlah focal point kehumasan PMI Pusat/Prov, Kab/Kota yang mengikuti pelatihan kehumasan internal/eksternal.	36 orang		36				
Output 1.2.2.									
Laporan analisis pemberitaan PMI yang dimuat di media massa (cetak, online, TV, radio) dan media sosial (Twitter dan Facebook) tersedia secara teratur di PMI Pusat/Prov.									
13	Jumlah total berita PMI yang dimuat pada media massa lokal/nasional di Pusat/Prov/ Kab/Kota.	Berita PMI adalah berita tentang kegiatan yang dilakukan atau didukung oleh PMI yang dimuat di media cetak, radio, televisi, dan internet. <u>Kalkulasi:</u> Total berita yang menggunakan kata kunci “PMI” yang dikompilasi oleh Biro Humas PMI Pusat.	1.000 Berita	50	150	200	200	200	200
14	Jumlah orang yang dijangkau oleh pemberitaan media massa tentang program/pelayanan PMI	Adalah orang yang mengakses pemberitaan media massa tentang program/pelayanan PMI. <u>Kalkulasi:</u> Jumlah audiens potensial dari pemberitaan PMI di media cetak, televisi, radio, dan internet.	10.000 Orang	1000	2000	2000	2000	2000	1000
15	Jumlah pengunjung Laman PMI.	Laman PMI memiliki pengunjung (visitors) dari berbagai negara yang membuka dan membaca berita layanan PMI yang dipublikasikan di www.pmi-jateng.or.id <u>Kalkulasi:</u> Jumlah pengunjung yang tercatat secara otomatis pada laman PMI.	200.000 Visitor	35000	35000	35000	35000	30000	30000

TUJUAN STRATEGIS-1									
Memelihara reputasi dan meningkatkan akuntabilitas PMI sebagai organisasi kemanusiaan di tingkat nasional maupun internasional.									
NO	INDIKATOR	URAIAN INDIKATOR	TARGET	TARGET PELAKSANAAN KEGIATAN					
				2021 7 Bulan	2022	2023	2024	2025	2026 4 Bulan
Output 1.2.3:									
Produk-produk kehumasan untuk memublikasikan program dan layanan PMI diterbitkan secara reguler kepada masyarakat/publik.									
16	Jumlah produk promosi/publikasi yang didistribusikan oleh PMI Pusat/ Prov/ Kab/Kota.	Produk promosi/publikasi adalah media promosi/publikasi yang memuat informasi kegiatan layanan PMI, baik saat bencana maupun situasi normal. Produk promosi/publikasi dapat berupa event promotion kit (spanduk, giant banner, umbul- umbul, roll banner, backdrop), brosur, poster, multimedia (video), foto, calendar kit (kalender dan agenda), dan majalah. <u>Kalkulasi:</u> Cukup jelas	1 Propinsi dan 35 PMI Kab/Kota Se Jawa Tengah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
17	TV-PMI memproduksi setidaknya 1(satu) siaran setiap 3(tiga) bulan	Produk TV-PMI adalah siaran tentang kegiatan PMI se Indonesia yang diseleksi menurut kriteria tertentu <u>Kalkulasi:</u> Cukup jelas	1 Propinsi dan 35 PMI Kab/Kota Se Jawa Tengah	36	36	36	36	36	36
Output 1.2.4									
Mekanisme umpan-balik untuk keterlibatan masyarakat dan akuntabilitas diimplementasikan oleh PMI Pusat									
18	Jumlah kegiatan Community Engagement and Accountability (CEA) yang dikelola oleh PMI Pusat	Adalah kegiatan yang menjangring umpan balik dari penerima manfaat langsung/tidak langsung dalam operasi tanggap darurat bencana tertentu, kesiapsiagaan bencana/pencegahan krisis kesehatan berbasis masyarakat, kegiatan layanan/bantuan sosial untuk kelompok rentan tertentu yang mendapat dukungan bantuan donor melalui PMI Pusat. <u>Kalkulasi:</u> Jumlah kegiatan layanan PMI yang menyertakan layanan CEA	150 Kegiatan di Propinsi dan 35 PMI Kab/Kota Se Jawa Tengah	10	35	35	35	35	
19	Jumlah anggota masyarakat yang memberikan umpan balik CEA melalui saluran media yang dikelola oleh PMI	Anggota masyarakat adalah penerima manfaat langsung/tidak langsung layanan PMI dalam operasi tanggap darurat bencana tertentu, kesiapsiagaan bencana/pencegahan krisis kesehatan berbasis masyarakat, kegiatan layanan/bantuan sosial lainnya yang memberikan umpan balik atas layanan-layanan PMI. <u>Kalkulasi:</u> Jumlah total penerima manfaat langsung/tidak langsung yang memberikan umpan balik CEA terhadap kegiatan layanan PMI.	500 Orang di Propinsi dan 35 PMI Kab/Kota Se Jawa Tengah	50	100	100	100	100	50

RENCANA OPERASIONAL 2021 - 2026

TUJUAN STRATEGIS-2									
Meningkatkan ketersediaan darah yang aman, mudah dijangkau dan berkualitas di seluruh Indonesia.									
NO	INDIKATOR	URAIAN INDIKATOR	TARGET	TARGET PELAKSANAAN KEGIATAN					
				2021 7 Bulan	2022	2023	2024	2025	2026 4 Bulan
Outcome 2.1									
Kapasitas Unit Donor Darah (UDD) yang sesuai standar nasional meningkat.									
20	UDD PMI Prov/Kab- Kota memenuhi standar Good Manufacturing Practice (GMP).	Standar <i>Good Manufacturing Practice</i> (GMP) mencakup semua elemen praktik yang akan menghasilkan produk atau layanan akhir yang dapat memenuhi spesifikasi yang ditetapkan secara konsisten (Australian Code of GMP 2000). Standar ini merupakan bagian dari upaya penjaminan kualitas yang menjamin bahwa komponen darah diproduksi dan dikontrol secara konsisten berdasarkan standar kualitas yang sesuai dengan tujuan penggunaannya, mengikuti spesifikasi yang telah ditetapkan (WHO Guidelines on GMP 2011). Kalkulasi: Jumlah UDD PMI yang telah mempraktikkan standar GMP	5 UDD PMI Kab- Kota	0	1	1	1	1	1
21	UDD PMI Prov/Kab- Kota memenuhi Standar Nasional	Standar Nasional mengacu kepada sekumpulan peraturan tentang pelayanan darah yang disusun oleh tim gabungan dari Kemenkes, PMI dan pihak terkait, sesuai standar AABB (American Assosiation Blood Bank), European Guidelines dan WHO. Kalkulasi: Jumlah UDD PMI yang telah melaksanakan standar CPOB	5 UDD PMI Kab- Kota	0	1	1	1	1	1
Output 2.1.1:									
Kebijakan, peraturan, panduan terkait Good Manufacturing Practice (GMP) pelayanan darah tersedia dan diimplementasikan di UDD semua tingkatan.									
22	Jumlah UDD Prov/Kab- Kota dengan Struktur Organisasi sesuai standar.	Standar untuk Struktur Organisasi mengacu kepada Permenkes no.83 tahun 2014 tentang unit transfusi darah, bank darah rumah sakit, dan jejaring pelayanan transfusi darah. Kalkulasi: Jumlah UDD PMI dengan stuktur organisasi mengacu pada PP No.83/2014	35 UDD PMI Prov/Kab- Kota	35	35	35	35	35	35
23	% UDD Prov/Kab- Kota yang lulus penilaian Pemantapan Mutu Eksternal (PME).	Penilaian Pemantapan Mutu Eksternal (PME) dilakukan dengan melihat hasil pemeriksaan uji saring/uji silang serasi di UDD dengan mengerjakan sampel terstandar Kalkulasi: Jumlah UDD PMI yang lulus PME, berbanding dengan total UDD PMI di Jawa Tengah	100% PMI Kab- Kota lulus penilaian PME	100%	100%	100%	100%	100%	100%

TUJUAN STRATEGIS-2									
Meningkatkan ketersediaan darah yang aman, mudah dijangkau dan berkualitas di seluruh Indonesia.									
NO	INDIKATOR	URAIAN INDIKATOR	TARGET	TARGET PELAKSANAAN KEGIATAN					
				2021 7 Bulan	2022	2023	2024	2025	2026 4 Bulan
Output 2.1.2									
Sistem manajemen UDD, termasuk struktur organisasi, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan, berjalan dengan baik di semua tingkatan.									
24	UDD Nasional/Prov/ Kabupaten/Kota melaksanakan penilaian kinerja pegawai setiap tahun.	Penilaian kinerja dilakukan melalui Data Penilaian Pegawai (DP2). Kalkulasi: Jumlah UDD PMI yang melaksanakan penilaian kinerja $\geq 50\%$ dari total pegawainya	35 UDD PMI Kab/Kota dan 1 Provinsi	36	36	36	36	36	36
25	Jumlah pegawai UDD PMI Prov/Kab- Kota dengan gaji pokok sesuai sistem penggajian Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berlaku.	Sistem penggajian PNS menyesuaikan sistem yang berlaku di Prov/Kabupaten/Kota masing- masing. Kalkulasi: Cukup jelas	35 UDD PMI Kab/Kota dan 1 Provinsi	36	36	36	36	36	36
26	%UDD PMI Prov/Kab- Kota melakukan audit keuangan oleh eksternal setiap tahun.	Audit adalah sebuah pemeriksaan laporan keuangan yang disiapkan oleh PMI untuk memeriksa kepatuhan terhadap ketentuan yang dilakukan secara independen oleh pihak eksternal. Kalkulasi: Cukup jelas	35 UDD PMI Kab/Kota dan 1 Provinsi	10	5	5	10	10	6
27	%UDD PMI Prov/Kab- Kota memiliki rencana kerja Setiap tahun.	Rencana kerja Setiap tahun adalah rencana kerja yang menggunakan format yang ditetapkan dan memuat informasi: · Tujuan Strategis · Outcome, indikator, dan targetnya · Output, indikator, dan targetnya · Kegiatan-kegiatan · Jumlah anggaran per kegiatan dan kategorinya Kalkulasi: Cukup jelas	35 UDD PMI Kab/Kota dan 1 Provinsi	36	36	36	36	36	36
28	%UDD PMI Prov/Kab- Kota memiliki laporan tahunan pelaksanaan program/kegiatan.	Laporan pelaksanaan kegiatan Setiap tahun UDD Prov/ Kabupaten/Kota adalah laporan hasil pelaksanaan rencana kerja, yang memuat informasi akan pencapaian: 1. target indikator Outcome target indikator Output 2. penjelasan singkat mengenai pelaksanaan kegiatan Kalkulasi: Cukup jelas	35 UDD PMI Kab/Kota dan 1 Provinsi	36	36	36	36	36	36

TUJUAN STRATEGIS-2									
Meningkatkan ketersediaan darah yang aman, mudah dijangkau dan berkualitas di seluruh Indonesia.									
NO	INDIKATOR	URAIAN INDIKATOR	TARGET	TARGET PELAKSANAAN KEGIATAN					
				2021 7 Bulan	2022	2023	2024	2025	2026 4 Bulan
Output 2.1.3									
Mekanisme komunikasi, koordinasi, dan pembinaan berjalan secara konsisten di internal UDD, antar tingkatan UDD, dan dengan pemangku kepentingan eksternal (Pemda, Dinkes, RS, POM Puskesmas, vendor, dll.).									
29	UDD Kab/Kota menerima kunjungan pembinaan dari UDD Provinsi minimal sekali setahun.	Kunjungan pembinaan teknis dari pegawai UDD di tingkat atasnya dapat dilakukan pada berbagai kesempatan dengan menggunakan panduan pembinaan yang ditetapkan. Kalkulasi: Cukup jelas	35 UDD PMI Prov/Kab-Kota	36	36	36	36	36	36
Outcome 2.2									
Kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana UDD Nasional/Prov/Kabupaten/Kota meningkat.									
30	Jumlah Diklat UDD yang diakreditasi oleh Kemenkes.	Proses pengajuan akreditasi dilakukan dengan melampirkan berbagai persyaratan untuk memperoleh pengakuan standar dari Kemenkes. Kalkulasi: Cukup jelas	2 Diklat	2	2	2	2	2	2
31	Jumlah pegawai UDD PMI Provinsi yang memenuhi 25 Satuan Kredit Profesional (SKP) dalam 5 tahun.	Satuan Kredit Profesional (SKP) adalah kredit yang harus dikumpulkan oleh para petugas teknis untuk mendapatkan kompetensi sebagai teknis untuk dapat praktek kerja. Kalkulasi: Jumlah pegawai UDD yang memenuhi 24 SKP 5(lima) tahun terakhir	4 Pegawai	4	4	4	4	4	4
Output 2.2.1									
Pegawai UDD terlatih dalam menerapkan GMP dan standar nasional sesuai dengan tupoksi dan kompetensi yang diperlukan.									
32	Jumlah pegawai UDD Prov/Kab-Kota yang mengikuti pelatihan GMP.	Kalkulasi: Jumlah pegawai UDD yang mengikuti pelatihan GMP pada tahun pelaporan	60 pegawai	10	10	10	10	10	10
33	Jumlah pegawai UDD Prov/Kab-Kota yang mendapatkan pelatihan minimal sekali setahun.	Kalkulasi: Cukup jelas	300 pegawai	50	50	50	50	50	50

TUJUAN STRATEGIS-2									
Meningkatkan ketersediaan darah yang aman, mudah dijangkau dan berkualitas di seluruh Indonesia.									
NO	INDIKATOR	URAIAN INDIKATOR	TARGET	TARGET PELAKSANAAN KEGIATAN					
				2021 7 Bulan	2022	2023	2024	2025	2026 4 Bulan
Output 2.2.2									
Tenaga Ahli Madya Teknik Transfusi Darah yang kompeten dan professional dihasilkan secara memadai oleh Program D3 Teknologi Transfusi Darah (TTD)									
34	% lulusan Program D3 TTD yang terserap di institusi pelayanan kesehatan.	Program D3 Teknologi Transfusi Darah (TTD) adalah pendidikan yang disediakan untuk para teknisi transfusi darah oleh institusi PTDD untuk menyediakan SDM yang kompeten di bidang teknologi transfusi darah. Kalkulasi: Jumlah lulusan program D3 TTD yang terserap, berbanding total lulusan program D3 TTD pada tahun pelaporan	100%	20%	20%	20%	20%	10%	10%
Output 2.2.3:									
Sarana prasarana, perlengkapan, peralatan, dan bahan habis pakai tersedia secara memadai dan terstandarisasi di semua UDD.									
35	UDD Prov/Kab-Kota memiliki peralatan sesuai dengan kelas pelayanannya.	Pelayanan UDD sesuai Permenkes 83 tahun 2014 terbagi atas tingkat utama, madya, dan pratama. Kalkulasi: Cukup jelas	100% UDD PMI Prov / Kab-Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%
36	UDD Prov/Kab-Kota menggunakan kantong darah dan reagen yang sesuai standar nasional.	Standar nasional untuk penggunaan kantong darah dan reagen mengacu pada PP no.7 tahun 2011 dan Permenkes 83 tahun 2014 serta peraturan baru yang sedang dalam pengesahan di Kemenkes. Kalkulasi: Total kantong darah yang sesuai standar nasional, yang didistribusikan oleh UDD PMI se Indonesia	35 UDD PMI Kab/Kota dan 1 Provinsi	20	10	6	0	0	0
Output 2.2.4									
Sistem Informasi Manajemen Unit Donor Darah (SIMDONDAR) berfungsi baik di semua tingkatan untuk mendukung pencatatan, pelaporan, dan penelusuran pelayanan darah.									
37	UDD Prov/Kab-Kota menggunakan Sistem Informasi Manajemen Unit Donor Darah (SIMDONDAR).	Sistem Informasi Manajemen Unit Donor Darah (SIMDONDAR) adalah sistem pencatatan seluruh aktivitas pelayanan darah di UDD mulai dari vena donor sampai ke vena pasien. Kalkulasi: Cukup jelas	35 UDD PMI Kab/Kota dan 1 Provinsi	15	5	5	5	5	6
38	UDD Prov/Kab-Kota mengirimkan laporan kegiatan pelayanan ke UDD Nasional melalui SIMDONDAR.	Laporan kegiatan pelayanan melaporkan seluruh aktivitas di UDD, mulai dari rekrutmen donor, seleksi dan pengambilan darah, hingga pengamanan, pengolahan, penyimpanan dan pendistribusian darah selama setahun. Kalkulasi: Cukup jelas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

TUJUAN STRATEGIS-2									
Meningkatkan ketersediaan darah yang aman, mudah dijangkau dan berkualitas di seluruh Indonesia.									
NO	INDIKATOR	URAIAN INDIKATOR	TARGET	TARGET PELAKSANAAN KEGIATAN					
				2021 7 Bulan	2022	2023	2024	2025	2026 4 Bulan
Outcome 2.3									
Ketersediaan darah yang aman, terjangkau dan berkualitas di semua UDD meningkat.									
39	% pedonor darah sukarela di UDD Prov/Kab- Kota yang menyumbangkan darahnya 3-4 kali dalam setahun.	Kalkulasi: Total pedonor darah sukarela yang menyumbangkan darahnya 3-4 kali dalam setahun, berbanding jumlah DDS se Indonesia	100%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
40	Jumlah darah (kantong) yang dapat digunakan untuk pengobatan setiap tahun di UDD Prov/Kab- Kota.	Kalkulasi:	500.000 Kantong	50,000	50,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Output 2.3.1:									
Upaya promosi Donor Darah Sukarela (DDS) dilakukan secara rutin dan meluas.									
41	Jumlah orang yang dijangkau dalam kegiatan promosi Donor Darah Sukarela (DDS) dalam setahun oleh UDD PMI Prov/Kab/Kota	Kegiatan promosi untuk merekrut Donor Darah Sukarela (DDS) dilakukan melalui pembuatan leaflet, tayangan iklan di media cetak, televisi, dan online di laman UDD web site, dan sebagainya.	300.000 Orang	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
Output 2.3.2									
Sentralisasi pengolahan darah, uji saring, dan uji silang serasi dilaksanakan untuk efektivitas dan efisiensi pelayanan darah.									
42	Jumlah UDD PMI Prov/Kab Kota yang menjalankan sentralisasi.	Sentralisasi adalah upaya untuk memusatkan proses pengolahan dan distribusi darah yang ada di beberapa UDD Kabupaten/Kota menjadi satu atau beberapa sentra di Provinsi.	35 UDD PMI Kab/Kota dan 1 Provinsi	36	36	36	36	36	36
43	Jumlah sentralisasi yang terbentuk.	Cukup jelas.	3 sentralisasi	3	3	3	3	3	3
Output 2.3.3									
Darah terdistribusi sesuai kebutuhan RS melalui jejaring pelayanan penyediaan darah.									
44	% permintaan darah yang rasional dan sesuai indikasi medis di RS terpenuhi di wilayah kerja UDD PMI Prov/Kab- Kota	Cukup jelas	90%	10%	20%	30%	20%	20%	10%

RENCANA OPERASIONAL 2021 - 2026

TUJUAN STRATEGIS-3									
Kapasitas Relawan PMI sebagai tulang-punggung lauanan kemanusiaan PMI di semua tingkatan meningkat secara kuantitas dan kualitas									
NO	INDIKATOR	URAIAN INDIKATOR	TARGET	TARGET PELAKSANAAN KEGIATAN					
				2021 7 Bulan	2022	2023	2024	2025	2026 4 Bulan
Outcome 3.1:									
Tatakelola Relawan (rekrutment, pembinaan, penugasan, pengembangan, penghargaan) terlaksana sesuai pedoman Manajemen Relawan									
45	% PMI Kab/Kota dengan database KSR/PMR/Relawan yang diperbaharui setiap tahunnya	<p>Adalah PMI Kab/Kota yang memperbaharui database KSR/PMR/Relawan, meliputi informasi yang tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none">• Data-data dasar individual• Masa aktif (dari waktu rekrutment hingga data aktifitas terakhir)• Catatan aktifitas individu (diklat ke-PM-an, penugasan)• Catatan spesialisasi individu• Status keaktifan individu (s/d jangka waktu 6 bulan setelah data aktifitas terakhir)• Waktu deaktivasi individu (unsubscribe) <p>Kalkulasi: Jumlah PMI Kab/Kota yang sudah memperbaharui database PMR/Relawan, berbanding dengan jumlah PMI Kab/Kota yang melapor.</p>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Output 3.1.1:									
Panduan manajemen PMR dan Sukarelawan (KSR dan TSR, termasuk Sukarelawan perusahaan/organisasi/ institusi) diimplementasikan di semua tingkatan.									
46	Jumlah KSR PMI Kab/Kota yang aktif dalam kegiatan selama satu tahun terakhir	<p>Adalah anggota Korps Relawan PMI Kab/Kota yang dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang dikelola oleh Markas PMI Kab/Kota setempat.</p> <p>Kalkulasi: Jumlah KSR PMI Kab/Kota yang tercatat ikut dalam kegiatan PMI Kab/kota selama satu tahun terkhir</p>	180	30	30	30	30	30	30
47	Jumlah Relawan mitra (perusahaan, organisasi, institusi) yang dimobilisasi oleh PMI Pusat, Prov, Kab/Kota setiap tahun	<p>Relawan mitra adalah karyawan perusahaan, organisasi, institusi yang terdaftar untuk mendukung kegiatan PMI berdasarkan spesialisasi/keterampilan khusus yang dimilikinya.</p> <p>Kalkulasi: Cukup jelas</p>	PMI Provinsi dan 35 PMI Kab/Kota Se Jateng	5	5	5	5	5	5

TUJUAN STRATEGIS-3									
Kapasitas Relawan PMI sebagai tulang-punggung lauanan kemanusiaan PMI di semua tingkatan meningkat secara kuantitas dan kualitas									
NO	INDIKATOR	URAIAN INDIKATOR	TARGET	TARGET PELAKSANAAN KEGIATAN					
				2021 7 Bulan	2022	2023	2024	2025	2026 4 Bulan
Output 3.1.2:									
Relawan PMI memperoleh pelatihan manajemen dan teknis/kejuruan/ketrampilan berbasis karakter dengan kompetensi ganda sesuai kebutuhan Organisasi dan Pelayanan									
48	Jumlah Relawan PMI Kab/Kota yang dilatih ketrampilan prioritas I/II/III.	Adalah Relawan PMI Kab/Kota yang mengikuti pelatihan sbb: <ul style="list-style-type: none">• Pelatihan ketrampilan prioritas I mencakup assessment, pertolongan pertama dan evakuasi, pemulihan hubungan keluarga, komunikasi dan kehumasan.• Pelatihan ketrampilan pelayanan prioritas II mencakup dapur umum, pelayanan kesehatan, pelayanan ambulans, dan program• Pelatihan ketrampilan prioritas III mencakup penampungan dan pengungsian, air dan sanitasi, distribusi dan relief. Kalkulasi: Cukup jelas.	300 relawan	50	50	50	50	50	50
49	Jumlah Relawan(KSR) PMI Kab/Kota yang dimobilisasi di tingkat Provinsi/ Nasional	Relawan PMI Kab.Kota terdaftar yang dimobilisasi oleh PMI Pusat/Provinsi untuk mendukung kegiatan PMI lintas daerah, baik untuk kebencanaan maupun non-bencana, berdasarkan spesialisasi, keterampilan khusus serta kompetensi yang dimilikinya. Kalkulasi: Cukup jelas.	300 relawan yang dimobilisasi	50	50	50	50	50	50
Output 3.1.3:									
Panduan mobilisasi Relawan yang diperbaharui tersedia dan diimplementasikan									
50	Jumlah operasi kedaruratan yang dikelola oleh PMI Provinisi/Kab/Kota yang mengimplementasikan panduan mobilisasi Relawan	PMI Pusat, Provinsi, Kab/Kota mengimplementasikan Panduan Mobilisasi Relawan dalam arti mensahkan dan menggunakannya dalam praktik manajemen Relawan. Panduan mobilisasi Relawan yang diterbitkan oleh PMI Pusat adalah panduan untuk penugasan Relawan dalam kegiatan PMI setempat dan kegiatan lintas daerah, dengan ketentuan-ketentuan yang antara lain tidak terbatas pada: <ul style="list-style-type: none">• Prosedur mobilisasi dan demobilisasi, termasuk briefing dan debriefing• Peraturan keselamatan dan keamanan bekerja di lapangan• Penyediaan perlengkapan APD• Asuransi selama penugasan• Transportasi dan akomodasi selama penugasan• Biaya penugasan Relawan Kalkulasi: Jumlah operasi kedaruratan yang mengimplementasikan panduan mobilisasi Relawan	PMI Provinsi dan 35 PMI Kab/Kota Se Jateng	35	35	35	35	35	35

TUJUAN STRATEGIS-3									
Kapasitas Relawan PMI sebagai tulang-punggung lauanan kemanusiaan PMI di semua tingkatan meningkat secara kuantitas dan kualitas									
NO	INDIKATOR	URAIAN INDIKATOR	TARGET	TARGET PELAKSANAAN KEGIATAN					
				2021 7 Bulan	2022	2023	2024	2025	2026 4 Bulan
51	Jumlah operasi kedaruratan yang dikelola PMI Provinsi yang mengimplementasikan ketentuan keselamatan (<i>duty of care</i>) untuk penugasan Relawan lintas daerah	<p>Ketentuan keselamatan kerja adalah ketentuan untuk jaminan keselamatan dan keamanan Relawan yang dimobilisasi atas permintaan PMI Provinsi untuk mendukung Operasi Tanggap Darurat Bencana skala menengah-besar, dengan ketentuan tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jaminan pelayanan kesehatan, bilamana ybs jatuh sakit, Biaya evakuasi hingga perawatan, bilamana ybs mengalami kecelakaan kerja Santunan, bilamana ybs gugur dalam penugasan <p>Kalkulasi: Jumlah operasi kedaruratan yang mengimplementasikan jaminan keselamatan dan keamanan Relawan</p>	PMI Provinsi dan 35 PMI Kab/Kota Se Jateng	35	35	35	35	35	35
Outcome 3.2:									
Pendidikan karakter kepada PMR Mula, Madya dan Wira terlaksana sesuai pedoman pembinaan PMR									
52	% Unit PMR PMI Kab/Kota yang melaporkan kegiatannya ≥ 4 kali dalam setahun	<p>Adalah Unit-Unit PMR (Mula/Madya/Wira) yang melaporkan implementasi rencana kegiatannya kepada PMI Kab/Kota pembinaanya, meliputi kegiatan yang antara lain tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kegiatan umum extra-kurikuler di sekolah yang diinisiasi oleh Unit-Unit PMR Implementasi program/kegiatan PMI: <ul style="list-style-type: none"> Kegiatan Remaja Sebaya Kampanye Lingkungan Hijau (green campaign) Sekolah Sehat Sekolah Siaga Bencana <p>Kalkulasi: Jumlah unit PMR yang aktif melapor sedikitnya 4 kali per tahun kepada PMI Kab/Kota, berbanding dengan jumlah unit PMR PMI se Indonesia</p>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
53	%PMI Kab/Kota yang memiliki unit PMR aktif setiap tingkatan ≥ 3 sekolah.	<p>Adalah PMI Kab/Kota yang membina kegiatan PMR Mula/Madya/Wira di sekolah-sekolah (Dasar/Menengah) yang berlokasi di Kabupaten/Kota terkait.</p> <p>Unit PMR aktif adalah sekolah dengan unit PMR yang melaksanakan kegiatan rutin ≥ 1 kegiatan setiap bulannya.</p> <p>Kalkulasi: Jumlah PMI Kab/Kota dengan unit PMR aktif ≥ 3 unit, berbanding dengan jumlah PMI Kab/Kota yang melapor.</p>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

TUJUAN STRATEGIS-3									
Kapasitas Relawan PMI sebagai tulang-punggung lauanan kemanusiaan PMI di semua tingkatan meningkat secara kuantitas dan kualitas									
NO	INDIKATOR	URAIAN INDIKATOR	TARGET	TARGET PELAKSANAAN KEGIATAN					
				2021 7 Bulan	2022	2023	2024	2025	2026 4 Bulan
Output 3.2 1:									
Terbentuknya unit-unit PMR di sekolah Dasar/Menengah dengan Guru Pembina PMR yang kompeten di PMI Kab/Kota									
54	Jumlah Pembina PMR PMI dengan unit PMR yang aktif dalam setahun terakhir	Adalah Guru/tenaga pendidik yang memfasilitasi kegiatan pembinaan PMR di sekolah-sekolah (dasar/menengah) Kalkulasi: Jumlah Guru Pembina PMR di unit-unit PMR yang aktif.	35 PMI Kab/Kota Se Jateng	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
55	Jumlah PMI Kab/Kota dengan unit PMR ≥6 unit	Unit PMR berbasis di sekolah dasar/menegah yang dibina oleh PMI Kab/Kota setempat, terdiri dari Sekolah Dasar (PMR Mula), Sekolah Menengah Pertama (PMR Madya) dan Sekolah Menengah Atas (PMR Wira). Kalkulasi: Total unit PMR (Mula, Madya,Wira) yang dilaporkan oleh semua PMI Kab/Kota se Indonesia	35 PMI Kab/Kota Se Jateng	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56	Jumlah anggota PMR se Indonesia	Anggota PMR adalah anggota unit PMR Mula, Madya dan Wira di sekolah-sekolah binaan PMI Kab/Kota seluruh Indonesia Kalkulasi: Total (individu) anggota PMR yang dilaporankan oleh semua PMI Kab/Kota	35 PMI Kab/Kota Se Jateng	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
57	PMI Prov/Kab-Kota melaksanakan Jumbara.	Jumbara (Jumpa Bakti Gembira) adalah sebuah acara setiap 3(tiga) tahun yang dihadiri oleh pelatih dan anggota PMR untuk berkumpul dan saling berbagi ilmu maupun pengalaman. Kalkulasi: Cukup jelas.	Aktual	5	5	5	5	5	5
Output 3.2.2:									
Kegiatan Unit PMR yang unik dan inovatif didokumentasikan, didiseminasikan, replikasi/duplikasi oleh Unit PMR di wilayah lainnya.									
58	Jumlah unit PMR yang melaporkan kegiatan yang unik, inovatif setiap tahunnya	Kegiatan Unit PMR yang unik dan inovatif adalah inisiatif kegiatan Unit PMR yang tidak termasuk dalam kegiatan khas PMR Kalkulasi: Jumlah kegiatan Unit PMR yang unik dan inovatif yang dilaporkan ke PMI Pusat	35 PMI Kab/Kota Se Jateng	35	35	35	35	35	35

RENCANA OPERASIONAL 2021 - 2026

TUJUAN STRATEGIS-4									
Meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan penanggulangan bencana, krisis kesehatan dan krisis kemanusiaan lainnya, melalui penguatan unit-unit pelayanan PMI di semua tingkatan dan pengembangan potensi sumber daya masyarakat.									
NO	INDIKATOR	URAIAN INDIKATOR	TARGET	TARGET PELAKSANAAN KEGIATAN					
				2021 7 Bulan	2022	2023	2024	2025	2026 4 Bulan
Outcome 4.1									
Kapasitas dan kualitas pelayanan PM di bidang kebencanaan dan pencegahan krisis kesehatan dan krisis kemanusiaan lainnya meningkat dengan berpedoman pada standar layanan kemanusiaan yang universal									
59	%Penerima Manfaat yang yang memberi umpan balik positif terhadap layanan kemanusiaan PMI	Adalah Penerima Manfaat layanan PMI yang disurvei dan memberikan umpan-balik positif melalui mekanisme Community Engagement and Accountability (CEA), meliputi: <ul style="list-style-type: none">Reward/apresiasi atas layanan PMIInput untuk perbaikan layananInformasi kebutuhan pelayanan PMI	100%	10%	20%	20%	20%	20%	10%
Output 4.1.1									
Tersedianya unit layanan kebencanaan, krisis kesehatan dan krisis kemanusiaan lainnya serta satuan spesialisasi yang professional di PMI Pusat/Prov/Kab/Kota									
60	Jumlah PMI Kab/Kota yang memiliki satuan respons darurat kebencanaan, krisis kesehatan ≥30 orang	Adalah PMI Kab/Kota yang telah membentuk Satuan Siaga Bencana (SATGANA) dengan ≥30 orang berkompetensi atau terlatih ketrampilan tanggap darurat bencana/pencegahan krisis kesehatan, seperti: Bantuan Manajemen Operasional <ul style="list-style-type: none">Kepemimpinan lapanganAssessmentLogistikPengelolaan Posko lapangan/ajuPelayanan informasiPelayanan administrasi dan keuangan Bantuan dan Pertolongan korban bencana <ul style="list-style-type: none">Distribusi ReliefPelayanan PP dasarSAR dan evakuasiPelayanan kesehatan,Bongkar-pasang tendaPelayanan Dapur Umum Kalkulasi: Jumlah PMI Kab/Kota yang melapor (jumlah anggota dan kompetensi) berbanding dengan jumlah semua PMI Kab/Kota yang dikategorikan rawan bencana.	35 PMI Kab-Kota	5	5	10	5	5	5

TUJUAN STRATEGIS-4									
Meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan penanggulangan bencana, krisis kesehatan dan krisis kemanusiaan lainnya, melalui penguatan unit-unit pelayanan PMI di semua tingkatan dan pengembangan potensi sumber daya masyarakat.									
NO	INDIKATOR	URAIAN INDIKATOR	TARGET	TARGET PELAKSANAAN KEGIATAN					
				2021 7 Bulan	2022	2023	2024	2025	2026 4 Bulan
61	Jumlah personil spesialis Tanggap Darurat PMI yang dimobilisasi pada saat bencana.	<p>Adalah Staf/KSR/TSR PMI dengan pengetahuan, praktisi, ketrampilan spesialis yang dimobilisasi oleh PMI Pusat untuk operasi bencana lintas Daerah, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spesialis Medis, Paramedis • Spesialis Shelter • Spesialis WASH • Spesialis Psychososial • Spesialis Manajemen Relief • Spesialis Manajemen Logistik • Spesialis PRB • Lain2 	100 personil spesialis Tanggap Darurat	30	20	20	10	10	10
62	Jumlah PMI Kab/Kota yang merespons peristiwa darurat kebencanaan, krisis kesehatan, krisis kemanusiaan lainnya per kesempatan pertama	<p>Adalah PMI Kab/Kota yang merespons peristiwa darurat kebencanaan, krisis kesehatan atau krisis kemanusiaan lainnya (konflik, bencana industri, gagal teknologi dll yang berdampak korban massal) baik sebelum bencana terjadi dan/atau per 6 jam-pertama setelah peristiwa bencana terjadi, meliputi aksi/tindakan dini, tindakan respons awal, antara lain, tidak terbatas pada:</p> <p>Pra-Bencana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memantau prakiraan cuaca (hydro- meteorological) yang berpotensi bencana • Menggerakkan potensi masyarakat • Kerjasama strategis dengan lembaga terkait • Konsolidasi sumber daya TDB PMI (SDM, Alat, Dana, Sistim mobilisasi, dst) <p>Sewaktu Bencana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengirim laporan situasi 1 x 24 jam • Mengkonsolidasikan anggota satuan tanggap darurat PMI setempat • Melaksanakan penilaian (asesmen) cepat • Melaksanakan koordinasi, komunikasi dengan PMI setingkat di atasnya dan lembaga terkait setempat • Melaksanakan distribusi air minum, air bersih, makanan siap saji (bila punya persediaan atau memiliki akses terhadap sumber-sumber yang menyediakan bantuan) <p>Kalkulasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah PMI Kab/Kota yang melaporkan aksi/ tindakan dini pra-bencana • Jumlah PMI Kab/Kota yang melaporkan setidaknya 3 kegiatan pada 6 jam-pertama 	35 PMI Kab-Kota	35	35	35	35	35	35

TUJUAN STRATEGIS-4									
Meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan penanggulangan bencana, krisis kesehatan dan krisis kemanusiaan lainnya, melalui penguatan unit-unit pelayanan PMI di semua tingkatan dan pengembangan potensi sumber daya masyarakat.									
NO	INDIKATOR	URAIAN INDIKATOR	TARGET	TARGET PELAKSANAAN KEGIATAN					
				2021 7 Bulan	2022	2023	2024	2025	2026 4 Bulan
63	Jumlah Kasus RFL yang ditindaklanjuti.	Adalah kasus RFL (tidak terbatas pada bencana/konflik) yang diajukan kepada PMI dan ditindaklanjuti hingga kasus dinyatakan ditutup oleh PMI Kab/Kota atau Provinsi, dan Pusat Kalkulasi: Jumlah kasus RFL yang ditindaklanjuti berbanding jumlah kasus yang diajukan ke PMI Pusat/Prov/Kab-Kota	25	5	5	5	5	5	5
Output 4.1.2									
Dokumen panduan/SOP untuk layanan kebencanaan, krisis kesehatan dan krisis kemanusiaan lainnya tersedia dan diimplementasikan									
64	Jumlah panduan/SOP/manual untuk manajemen kedaruratan tersedia di PMI Pusat.	Adalah panduan/SOP/manual, metode manajemen (tatakelola) termasuk layanan/bantuan kemanusiaan (CBI, FBA), termasuk aplikasi berbasis teknologi informasi, untuk layanan kebencanaan, krisis kesehatan dan krisis kemanusiaan lainnya yang ada terbarukan sesuai dengan standard yang berlaku universal. Kalkulasi: Jumlah panduan/SOP/manual manajemen/layanan kedaruratan yang diterbitkan oleh PMI Pusat.	20 panduan/SOP	4	4	4	4	2	2
65	PMI Provinsi, Kab-Kota melaksanakan simulasi kedaruratan sesuai Panduan/ SOP kedaruratan	Simulasi kedaruratan adalah kegiatan aplikasi respons kedaruratan berbasis scenario tertentu, yang dilaksanakan dalam bentuk “ <i>table-top exercise</i> ” (menguji efektifitas alur koordinasi dan komunikasi) atau “ <i>application exercise</i> ” (menguji aksi-aksi respons) yang merujuk pada panduan/SOP kedaruratan. Kalkulasi: Jumlah kegiatan simulasi kedaruratan yang diinisiasi oleh PMI Pusat/Prov/Kab-Kota	15 simulasi	1	2	3	3	3	3
Output 4.1.3									
Pelayanan kemanusiaan PMI dilaksanakan sesuai standar teknis, kualitas dan akuntabilitas yang berlaku secara universal.									
66	Jumlah laporan operasi kedaruratan yang dipublikasikan kepada pihak Donor local dan internasional	Adalah laporan kepada pihak donor sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga, yang memuat informasi tentang kemajuan implementasi, capaian-capaian target dan realisasi anggaran, yang disampaikan secara tepat waktu. Kalkulasi: Jumlah operasi kedaruratan yang memperoleh dukungan donor yang dilaporkan/dipertanggungjawabkan	20	4	4	4	4	4	0

TUJUAN STRATEGIS-4									
Meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan penanggulangan bencana, krisis kesehatan dan krisis kemanusiaan lainnya, melalui penguatan unit-unit pelayanan PMI di semua tingkatan dan pengembangan potensi sumber daya masyarakat.									
NO	INDIKATOR	URAIAN INDIKATOR	TARGET	TARGET PELAKSANAAN KEGIATAN					
				2021 7 Bulan	2022	2023	2024	2025	2026 4 Bulan
67	Jumlah operasi kedaruratan PMI tingkat nasional dengan layanan/ bantuan kemanusiaan sesuai standar teknis yang berlaku universal	<p>Operasi kedaruratan PMI tingkat nasional adalah operasi TDB yang memperoleh bantuan dana internasional yang dikelola oleh PMI Pusat. Standar teknis universal adalah standar kualitas, kuantitas dan akuntabilitas menurut panduan layanan/bantuan SPHERE, WHO, UNICEF, UNHCR.</p> <p>Operasi PMI adalah layanan/bantuan kemanusiaan kedaruratan dan non-kedaruratan yang memberikan layanan, tidak terbatas pada sektor:</p> <ul style="list-style-type: none">• Layanan/bantuan hunian (Shelter)• Layanan/bantuan non-pangan (non-food items)• Layanan/bantuan air dan sanitasi (WASH)• Layanan/bantuan kesehatan (Health, PSS) <p>Kalkulasi: Jumlah operasi kedaruratan dan non-kedaruratan yang mengaplikasi standar-standar teknis dalam sector-sektor layanan/bantuannya.</p>	1	1	1	1	1	1	1
68	Jumlah Penerima manfaat layanan kemanusiaan PMI terdokumentasi, terpilah menurut kategori jender dan usia	<p>Penerima Manfaat layanan kemanusiaan PMI adalah individu/keluarga/kelompok masyarakat yang menerima manfaat langsung layanan darurat bencana dan/atau krisis kemanusiaan lainnya maupun program/kegiatan lain-lain di luar situasi kebencanaan/krisis kemanusiaan lainnya, termasuk program/kegiatan berbasis masyarakat. Terdokumentasi adalah tercatat jumlahnya dan dipilah menurut kategori jender dan usia.</p> <p>Kalkulasi:</p> <ul style="list-style-type: none">• Jumlah total penerima manfaat layanan PMI disemua tingkatan yang tercatat• Penerima manfaat layanan PMI dipilah menurut kelompok jender dan usia	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000

TUJUAN STRATEGIS-4									
Meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan penanggulangan bencana, krisis kesehatan dan krisis kemanusiaan lainnya, melalui penguatan unit-unit pelayanan PMI di semua tingkatan dan pengembangan potensi sumber daya masyarakat.									
NO	INDIKATOR	URAIAN INDIKATOR	TARGET	TARGET PELAKSANAAN KEGIATAN					
				2021 7 Bulan	2022	2023	2024	2025	2026 4 Bulan
68	Jumlah kegiatan layanan/bantuan kemanusiaan PMI yang mengelola issue jender, proteksi, inklusifisme (PGI)	<p>Issue terkait jender, proteksi dan inklusifisme adalah pertimbangan normative dan akuntabilitas yang melekat pada setiap bentuk layanan/bantuan kemanusiaan, untuk memastikan penghormatan terhadap martabat penerima manfaat (<i>dignity</i>), ketersediaan akses untuk kelompok rentan tertentu (<i>access</i>), keterlibatan penerima manfaat (<i>participation</i>), dan rasa aman (<i>safety</i>) terhadap tindakan kekerasan, pelecehan, intoleransi dll.</p> <p>Issue jender, proteksi, inklusifisme yang dikelola meliputi langkah-langkah dalam layanan kemanusiaan PMI, antara lain, tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan layanan/bantuan PMI • Implementasi/distribusi layanan/bantuan PMI, termasuk bantuan berbasis tunai (CBI) <p>Kalkulasi: Jumlah kegiatan layanan/bantuan kemanusiaan PMI, kedaruratan dan non-kedaruratan, yang memperhatikan issue jender, proteksi dan inklusifisme.</p>	10	2	2	2	2	1	1
Output 4.1.4									
Layanan kesehatan umum, spesialis/sub-spesialis berbasis fasilitas kesehatan tumbuh dan berkembang									
69	Jumlah PMI Kab-Kota yang menginisiasi pendirian fasilitas layanan kesehatan	<p>Fasilitas layanan kesehatan PMI adalah sarana layanan kesehatan untuk umum, memiliki ijin pendirian yang diterbitkan oleh pihak berwenang, yang dikelola oleh PMI Prov/Kab-Kota dengan layanan yang tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rumah Sakit Umum • Klinik kesehatan, umum/khusus • Dokter Umum • Apotik • Laboratorium pendukung diagnosis • Layanan hemodialisa • Layanan lain-lain yang relevan <p>Kalkulasi: Jumlah Kab-Kota yang melaporkan pendirian atau pengoperasian fasilitas kesehatan.</p>	20 PMI Kab-Kota	17	17	17	17	3	3

TUJUAN STRATEGIS-4									
Meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan penanggulangan bencana, krisis kesehatan dan krisis kemanusiaan lainnya, melalui penguatan unit-unit pelayanan PMI di semua tingkatan dan pengembangan potensi sumber daya masyarakat.									
NO	INDIKATOR	URAIAN INDIKATOR	TARGET	TARGET PELAKSANAAN KEGIATAN					
				2021 7 Bulan	2022	2023	2024	2025	2026 4 Bulan
70	Jumlah fasilitas layanan kesehatan PMI yang memenuhi standar sertifikasi kelayakan oleh pihak berwenang	<p>Adalah fasilitas layanan kesehatan PMI yang memenuhi standar teknis dan kualitas yang disertifikasi oleh Dinas Kesehatan setempat, tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> Memiliki ijin pendirian/operasional dari pihak berwenang Ketersediaan tenaga medis/paramedic yang memadai sesuai jenis layanan dan kapasitas layanannya Ketersediaan ruang layanan yang memenuhi standar hygienic, layak Ketersediaan prosedur layanan standar Memiliki jaringan pelayanan rujukan <p>Kalkulasi: Jumlah PMI Kab-Kota yang memiliki sertifikat pelayanan dari Dinas Kesehatan setempat.</p>	20 PMI Kab-Kota	17	17	17	17	3	3
71	Jumlah PMI Kab-Kota dengan fasilitas layanan kesehatan yang melaporkan jumlah penerima manfaatnya	<p>Penerima Manfaat adalah pengunjung yang memperoleh layanan langsung dari fasilitas layanan kesehatan PMI Kab-Kota.</p> <p>Kalkulasi: Jumlah PMI Kab-Kota dengan fasilitas Yankes yang melaporkan jumlah penerima manfaatnya (dipilah menurut kategori umur dan jender)</p>	20 PMI Kab-Kota	17	17	17	17	3	3
Outcome 4.2									
Kapasitas dan kualitas pelayanan PMI dalam upaya pengurangan risiko bencana (PRB) dan pencegahan krisis kesehatan yang berbasis masyarakat meningkat									
72	Jumlah PMI Kab/Kota memiliki setidaknya 1(satu) komunitas binaan program PRB/Kesehatan.	<p>Komunitas Binaan adalah kelompok anggota masyarakat di satuan teritorial tertentu (kelurahan, desa, dusun) yang menjadi sasaran program/kegiatan PMI berbasis masyarakat untuk upaya pengurangan risiko bencana dan/atau pencegahan krisis kesehatan dengan berbagai kegiatan dalam kategori sbb:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mengorganisir masyarakat Mengedukasi masyarakat Memberdayakan masyarakat <p>Kalkulasi: Jumlah PMI Kab/Kota yang menyelenggarakan program/kegiatan di tingkat masyarakat</p>	10 PMI Kab-Kota	2	2	2	2	1	1
73	Jumlah Penerima Manfaat langsung dari program/kegiatan PMI Kab/Kota berbasis masyarakat	<p>Adalah kelompok sasaran langsung program/kegiatan berbasis masyarakat, PRB atau pencegahan krisis kesehatan, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> Anggota satuan/kelompok yang dilatih PMI Penerima manfaat edukasi, sosialisasi Individu/kelompok dengan inisiatif PRB atau pencegahan krisis kesehatan yang mendapat dukungan PMI 	1000	200	200	200	200	100	100

TUJUAN STRATEGIS-4									
Meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan penanggulangan bencana, krisis kesehatan dan krisis kemanusiaan lainnya, melalui penguatan unit-unit pelayanan PMI di semua tingkatan dan pengembangan potensi sumber daya masyarakat.									
NO	INDIKATOR	URAIAN INDIKATOR	TARGET	TARGET PELAKSANAAN KEGIATAN					
				2021 7 Bulan	2022	2023	2024	2025	2026 4 Bulan
		Kalkulasi: Total penerima manfaat langsung dari program/kegiatan berbasis masyarakat yang dilaporkan oleh PMI Kab/Kota. Jumlah Penerima manfaat dipilah menurut kategori jender dan usia.							
Output 4.2.1: PMI Kab/kota memiliki kapasitas dalam memfasilitasi upaya kegiatan PRB dan pencegahan krisis kesehatan berbasis masyarakat.									
74	Jumlah KSR/TSR PMI Kab/Kota yang dilibatkan dalam program/kegiatan berbasis masyarakat.	Adalah KSR/TSR PMI Kab/Kota yang memperoleh pelatihan khas PRB dan pencegahan krisis kesehatan yang dimobilisasi untuk program/kegiatan PMI berbasis masyarakat seperti: <ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan, edukasi kepada masyarakat sasaran • Pendampingan kelompok masyarakat sasaran • Memfasilitasi masyarakat sasaran dengan sumber-sumber pembangunan setempat Kalkulasi: Total jumlah KSR/TSR dari semua PMI Kab/Kota yang menyelenggarakan program/kegiatan berbasis masyarakat.	100	20	20	20	20	10	10
75	Jumlah PMI Kab/Kota yang memiliki setidaknya satu unit lembaga Pendidikan dengan kegiatan PRB, pencegahan krisis kesehatan	Lembaga Pendidikan adalah sekolah dasar- menengah dan Perguruan Tinggi binaan PMI Kab/Kota yang menyelenggarakan kegiatan PRB dan/atau pencegahan krisis kesehatan, antara lain, tidak terbatas pada: <ul style="list-style-type: none"> • Mobilisasi PMR/KSR untuk pengurangan resiko di lingkungan sekolah/kampus (untuk Pelatihan PB/PP, penyuluhan PB/Kes, inisiatif pemeliharaan lingkungan, promosi sadar bencana) • Menyelenggarakan simulasi tanggap darurat di lingkungan sekolah/kampus (penyelamatan diri, menyiapkan sekolah/kampus sbg. tempat penampungan sementara) Kalkulasi: Jumlah PMI Kab/Kota dengan kegiatan pembinaan di lembaga-lembaga Pendidikan.	35 PMI Kab-Kota	6	6	6	6	6	5
Output 4.2.2 Terlaksananya program-program pengurangan risiko bencana dan pencegahan krisis kesehatan berbasis masyarakat dukungan Mitra Gerakan.									
76	Jumlah proyek berbasis masyarakat dukungan Mitra yang diimplementasi oleh PMI	Adalah proyek-proyek berbasis masyarakat di bidang kebencanaan dan/atau pencegahan krisis kesehatan yang memperoleh dukungan Mitra (Gerakan dan Non-Gerakan), baik dalam bentuk program bilateral maupun komitmen PMI terhadap global Movement Initiatives. Kalkulasi: Cukup jelas	6 proyek	1	1	1	1	1	1

TUJUAN STRATEGIS-4									
Meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan penanggulangan bencana, krisis kesehatan dan krisis kemanusiaan lainnya, melalui penguatan unit-unit pelayanan PMI di semua tingkatan dan pengembangan potensi sumber daya masyarakat.									
NO	INDIKATOR	URAIAN INDIKATOR	TARGET	TARGET PELAKSANAAN KEGIATAN					
				2021 7 Bulan	2022	2023	2024	2025	2026 4 Bulan
77	Jumlah penerima manfaat langsung proyek berbasis masyarakat dukungan Mitra Gerakan	<p>Adalah individu, keluarga atau kelompok anggota masyarakat di wilayah sasaran yang memperoleh manfaat langsung dari kegiatan-kegiatan berbasis masyarakat yang memperoleh dukungan Mitra Gerakan</p> <p>Kalkulasi: Cukup jelas</p>	1000 penerima manfaat	200	200	200	200	100	100
Output 4.2.3									
Terbentuknya kelompok masyarakat terlatih sebagai Mitra Strategis untuk upaya pengurangan risiko bencana dan pencegahan krisis kesehatan									
78	Jumlah kelompok masyarakat terlatih yang dibina oleh PMI Kab/Kota	<p>Kelompok masyarakat terlatih adalah anggota masyarakat yang memperoleh pelatihan ketrampilan khas ke-PM-an, respons bencana serta krisis kesehatan yang akan menjadi ujung- tombak kegiatan PMI berbasis masyarakat.</p> <p>Kalkulasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah organisasi (kelompok) masyarakat terlatih per komunitas binaan PMI Total jumlah organisasi (kelompok) masyarakat terlatih dari semua komunitas binaan PMI 	90 kelompok masyarakat	10	20	20	20	10	10
79	Jumlah kegiatan PRB, pencegahan krisis kesehatan di wilayah binaan PMI Kab/Kota yang diinisiasi secara mandiri oleh masyarakat	<p>Kegiatan yang dinisiasi secara mandiri adalah kegiatan PRB, pencegahan krisis kesehatan yang direncanakan dan diimplementasikan dengan menggunakan sumber daya masyarakat sendiri, dikelola oleh masyarakat dan hasilnya digunakan oleh masyarakat itu sendiri.</p> <p>Kalkulasi: Jumlah kegiatan berbasis masyarakat yang mandiri yang dilaporkan oleh PMI Kab/Kota.</p>	10	1	1	2	2	2	2

TUJUAN STRATEGIS-4									
Meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan penanggulangan bencana, krisis kesehatan dan krisis kemanusiaan lainnya, melalui penguatan unit-unit pelayanan PMI di semua tingkatan dan pengembangan potensi sumber daya masyarakat.									
NO	INDIKATOR	URAIAN INDIKATOR	TARGET	TARGET PELAKSANAAN KEGIATAN					
				2021 7 Bulan	2022	2023	2024	2025	2026 4 Bulan
Outcome 4.3:									
Kualitas dan jangkauan pelayanan sosial yang diberikan oleh PMI kepada masyarakat yang paling membutuhkan meningkat									
80	Jumlah PMI Kab-Kota yang melaksanakan kegiatan pelayanan sosial terpadu	<p>Pelayanan sosial terpadu adalah bantuan untuk sector layanan tertentu yang dipadukan dengan sector relevan lainnya. Misalnya:</p> <ul style="list-style-type: none">• Program/kegiatan WASH, dipadukan dengan kesehatan Ibu-Anak Balita• Program/kegiatan layanan kesehatan, dipadukan dengan edukasi kesehatan• Program/kegiatan psikososial untuk anak jalanan, dipadukan dengan kegiatan Pendidikan karakter <p>Layanan sosial terpadu diorganisir untuk membantu, memperbaiki kondisi sosial individu atau kelompok yang memerlukan perhatian khusus, antara lain, tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none">• Individu/Keluarga kurang mampu secara ekonomi• Individu/kelompok penyandang masalah sosial• Individu/kelompok penyandang masalah kesehatan• Individu penyandang disabilitas• Kelompok yatim-piatu• Anak Balita• Anak-Anak dari keluarga kurang mampu• KK Perempuan• Individu/kelompok migran tidak berdokumen <p>Kalkulasi: Jumlah Kab-Kota yang melaksana kegiatan pelayanan sosial terpadu.</p>	35 PMI Kab-Kota	35	35	35	35	35	35
81	Jumlah penerima manfaat langsung layanan sosial di PMI Kabupaten/Kota	<p>Penerima manfaat langsung layanan sosial adalah individu atau kelompok tertentu yang menerima bantuan, layanan/fasilitas melalui kegiatan terorganisir, antara lain, tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none">• Fasilitasi layanan sosial• Bantuan material• Bhakti sosial• Bantuan kacamata optic• Operasi katarak• Khitanan massal	600	100	100	100	100	100	100

TUJUAN STRATEGIS-4									
Meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan penanggulangan bencana, krisis kesehatan dan krisis kemanusiaan lainnya, melalui penguatan unit-unit pelayanan PMI di semua tingkatan dan pengembangan potensi sumber daya masyarakat.									
NO	INDIKATOR	URAIAN INDIKATOR	TARGET	TARGET PELAKSANAAN KEGIATAN					
				2021 7 Bulan	2022	2023	2024	2025	2026 4 Bulan
		Kalkulasi: Jumlah penerima manfaat pelayanan sosial yang dilaporkan PMI Kab/Kota, dipilah menurut kategori jender dan usia.							
Output 4.3.1									
Dokumen panduan/SOP dan perangkat penunjang pelayanan sosial (seperti media KIE, alat peraga, perangkat M&E) tersedia, termutakhirkan, dan digunakan di PMI.									
82	Jumlah Panduan/SOP, perangkat penunjang pelayanan sosial yang tersedia di PMI Pusat.	Panduan/SOP pelayanan sosial memuat teknis pelaksanaan pelayanan sosial mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi atau penutupan. Contoh perangkat penunjang pelayanan sosial antara lain media KIE, alat peraga, dan perangkat M&E. Kalkulasi: Jumlah panduan/SOP pelayanan sosial yang diterbitkan oleh PMI Pusat	10	1	2	2	2	2	1
Output 4.3.2									
Kegiatan-kegiatan pelayanan sosial dilaksanakan oleh staf/sukarelawan yang kompeten di PMI semua tingkatan.									
83	Jumlah Staf/Relawan PMI yang kompeten dibidang pelayanan sosial	Adalah Staf/Relawan PMI yang telah memperoleh pelatihan khas Pelayanan Sosial dan dimobilisasi untuk melaksanakan kegiatan pelayanan sosial. Kalkulasi: Jumlah Staf/Relawan yang dimobilisasi untuk melaksanakan kegiatan pelayanan sosial.	100	10	20	20	20	20	10

RENCANA OPERASIONAL 2021 - 2026

TUJUAN STRATEGIS-5									
Mewujudkan PMI yang berfungsi baik, dengan Kepemimpinan yang berpedoman kuat pada Prinsip-Prinsip Dasar Gerakan Internasional PM/BSM dan tatakelola organisasi yang sinergis dalam pelaksanaan kegiatan, peraturan organisasi, sistem, dan prosedur yang berlaku.									
NO	INDIKATOR	URAIAN INDIKATOR	TARGET	TARGET PELAKSANAAN KEGIATAN					
				2021 7 Bulan	2022	2023	2024	2025	2026 4 Bulan
Output 5.1.1:									
AD/ART/PO dan aturan pelaksanaannya serta produk hukum lainnya tersedia dan diimplementasikan di semua tingkatan									
84	Jumlah Peraturan Organisasi yang diterbitkan oleh PMI Pusat mengacu pada AD/ART PMI	<p>Peraturan Organisasi adalah aturan-aturan setingkat di bawah AD/ART yang menjabarkan garis besar tata kelola organisasi PMI dan dapat menjadi acuan penyusunan peraturan PMI Pusat/Provinsi/Kab-Kota yang disesuaikan, seperti:</p> <ul style="list-style-type: none">• Kepengurusan• Kemarkasan, termasuk issue jender dan proteksi• Pelayanan• Sumber Daya Manusia• Tata kelola keuangan• Tata kelola Aset dan Logistik• Kepegawaian, termasuk issue jender dan keberagaman• Perencanaan dan Pelaporan• Kemitraan• Pencitraan <p>Kalkulasi: Jumlah dokumen final terkait dengan ketentuan hukum PMI seperti Peraturan PMI, Peraturan Organisasi dan ketentuan PMI lainnya.</p>	Th 2020 menerima PO dari Pusat dan mensosialisasi kan ke Kab/Kota	3					
85	Jumlah PMI Prov/Kab-Kota yang menerbitkan PO daerah mengacu pada PO yang diterbitkan PMI Pusat	<p>Peraturan Organisasi yang diterbitkan oleh PMI Prov/Kab-Kota yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PMI setempat serta mengacu, sebagian atau keseluruhan, pada produk-produk hukum yang diterbitkan oleh PMI Pusat</p> <p>Kalkulasi:</p> <ul style="list-style-type: none">• Jumlah PMI Prov/Kab-Kota yang melapor telah menerbitkan PO daerah.• Jumlah jenis PO yang diterbitkan PMI Prov/Kab-Kota	35 PMI Kab/Kota tersosialisasi PO Pusat/Provinsi	35					
86	PMI disemua tingkatan melaksanakan Musyawarah setiap 5(lima) tahun tepat waktu.	<p>PMI Pusat/Prov/Kab-Kota yang melaksanakan Musyawarah selambat-lambatnya ≤3 bulan setelah masa bakti Kepengurusan berakhir.</p> <p>Kalkulasi: Jumlah PMI Prov/Kab-Kota yang melaksanakan Musyawarah pada tahun pelaporan</p>	35 PMI Kab/Kota melaksanakan Musyawarah	35	35	35	35	35	35

TUJUAN STRATEGIS-5									
Mewujudkan PMI yang berfungsi baik, dengan Kepemimpinan yang berpedoman kuat pada Prinsip-Prinsip Dasar Gerakan Internasional PM/BSM dan tatakelola organisasi yang sinergis dalam pelaksanaan kegiatan, peraturan organisasi, sistem, dan prosedur yang berlaku.									
NO	INDIKATOR	URAIAN INDIKATOR	TARGET	TARGET PELAKSANAAN KEGIATAN					
				2021 7 Bulan	2022	2023	2024	2025	2026 4 Bulan
87	PMI disemua tingkatan melaksanakan Musyawarah Kerja tahunan sesuai jadwal yang ditetapkan	<p>PMI Pusat/Prov/Kab-Kota yang melaksanakan Musyawarah Kerja sebelum pengesahan rencana anggaran Pemerintah di Kab-Kota, Provinsi dan Pusat.</p> <p>Kalkulasi: Jumlah PMI Prov/Kab-Kota yang melaksanakan Muker pada tahun pelaporan</p>	35 PMI Kab/Kota terlaksana Musyawarah Kerja Tahunan	35	35	35	35	35	35
88	Jumlah PMI Kab-Kota yang memperoleh orientasi ORTALA	<p>Orientasi Organisasi dan Tatalaksana adalah orientasi yang diberikan kepada Pengurus (baru) tentang praktik, prosedur dan implementasi peraturan organisasi diberbagai bidang, diantaranya, tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepemimpinan yang berpedoman pada penerapan Prinsip-Prinsip Dasar Kepalangmerahan • Penerapan Prinsip Dasar Kepalangmerahan dalam situasi norma/kedaruratan atau implementasi kerangka kerja Akses yang lebih aman (Safer Access Framework); • Prosedur layanan pada saat normal dan kedaruratan; • Pembagian tugas dan tanggungjawab Pengurus dan Staf dalam arti luas; • Strategi Keberlanjutan Dukungan Organisasi untuk PMI yang tidak aktif (Business Continuity Plan); • Hubungan PMI antar tingkatan (vertikal, horizontal); <p>Kalkulasi: Jumlah PMI Prov/Kab-Kota yang memperoleh orientasi Kepengurusan PMI dari PMI Pusat, IFRC dan ICRC</p>	Ditetapkan oleh PMI Pusat	36	36	36	36	36	36

TUJUAN STRATEGIS-5									
Mewujudkan PMI yang berfungsi baik, dengan Kepemimpinan yang berpedoman kuat pada Prinsip-Prinsip Dasar Gerakan Internasional PM/BSM dan tatakelola organisasi yang sinergis dalam pelaksanaan kegiatan, peraturan organisasi, sistem, dan prosedur yang berlaku.									
NO	INDIKATOR	URAIAN INDIKATOR	TARGET	TARGET PELAKSANAAN KEGIATAN					
				2021 7 Bulan	2022	2023	2024	2025	2026 4 Bulan
Output 5.1.2:									
Mekanisme konsultasi reguler antara Pengurus dan Dewan Kehormatan PMI disemua tingkatan berfungsi									
89	Pertemuan konsultasi Pengurus dan Dewan Kehormatan dilaksanakan secara reguler	<p>Pertemuan konsultasi Pengurus dan Dewan Kehormatan adalah pertemuan rutin atas inisiatif Pengurus dan/atau atas undangan Dewan Kehormatan, yang berfungsi antara lain tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none">Sebagai mekanisme komunikasi untuk memastikan Kepemimpinan dan tatakelola organisasi dilaksanakan sesuai dengan Pokok-Pokok Kebijakan PMI.Sebagai mekanisme untuk berbagi informasi tentang kinerja PMI setempat.Sebagai mekanisme untuk menggalang dukungan.Sebagai mekanisme untuk pemecahan masalah. <p>Kalkulasi: Jumlah pertemuan konsultasi Pengurus dan Dewan Kehormatan yang terlaksana.</p>	4 kali se Tahun di tingkat PMI Prov. Jateng	4	4	4	4	4	4
Output 5.1.3.									
Kegiatan pembinaan berjenjang dalam bidang organisasi dan program dilakukan secara rutin serta sesuai kebutuhan.									
90	Jumlah PMI Kab-Kota yang menerima kunjungan pembinaan oleh PMI setingkat di atasnya minimal satu kali dalam setahun	<p>Adalah kunjungan pembinaan dari Pengurus setingkat di atasnya saat musyawarah/musyawarah kerja atau momentum lain dengan menggunakan panduan pembinaan yang ditetapkan.</p> <p><u>Kalkulasi:</u> Cukup jelas</p>	35 PMI Kab/Kota Se Jateng	35	35	35	35	35	35
Output 5.1.4:									
Komunikasi dan koordinasi internal dan antar tingkatan PMI, termasuk lintas Prov/Kab-Kota terlaksana sesuai kerangka acuan yang disepakati									
91	Jumlah forum regional PMI Prov/Kab-Kota yang terbentuk	<p>Forum Regional PMI adalah forum koordinasi dan komunikasi antara beberapa Provinsi atau antar Kab/Kota se-Provinsi yang dibentuk berdasarkan kedekatan geographis, kepentingan bersama, terstruktur yang disepakati dan diketahui/disetujui oleh PMI setingkat di atasnya.</p> <p><u>Kalkulasi:</u></p> <ul style="list-style-type: none">Jumlah PMI Provinsi dengan forum regional antar Kab/Kota se provinsi	3 Paguyuban Wilayah	3	3	3	3	3	3

TUJUAN STRATEGIS-5									
Mewujudkan PMI yang berfungsi baik, dengan Kepemimpinan yang berpedoman kuat pada Prinsip-Prinsip Dasar Gerakan Internasional PM/BSM dan tatakelola organisasi yang sinergis dalam pelaksanaan kegiatan, peraturan organisasi, sistem, dan prosedur yang berlaku.									
NO	INDIKATOR	URAIAN INDIKATOR	TARGET	TARGET PELAKSANAAN KEGIATAN					
				2021 7 Bulan	2022	2023	2024	2025	2026 4 Bulan
92	Jumlah kesepakatan regional yang diimplementasikan	Adalah output kerjasama regional PMI yang ditindaklanjuti bersama dan dilaporkan kemajuan- kemajuannya dalam forum koordinasi. Kalkulasi: Jumlah dokumen kerjasama regional yang dilaporkan forum-forum regional.	3 Paguyuban Wilayah	3	3	3	3	3	3
Outcome 5.2:									
Fungsi-fungsi ke-Markas-an berjalan sesuai Tupoksi terutama aspek manajemen dan administrasi dalam mendukung pelayanan kepalangmerahan									
93	% Markas PMI disemua tingkatan yang memenuhi kriteria manajemen dan administrasi yang berfungsi baik	Markas PMI dengan kriteria manajemen dan administrasi yang berfungsi baik, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> Memiliki sistim tatakelola keuangan yang akuntabel Melaksanakan tertib administrasi yang tercatat secara sistimatis, tersimpan baik, dan dilaporkan secara teratur Memiliki tatakelola kepegawaian yang komprehensif Memiliki perencanaan program dan anggaran tahunan Membuat laporan kegiatan dan periodik (bulanan, triwulan, semester, tahunan) secara tepat waktu Memiliki staf kompeten yang permanen dalam jumlah yang memadai Memiliki anggaran program dan operasional Kalkulasi: Jumlah Markas PMI Prov/Kab-Kota dengan ≥4 kriteria manajemen dan administrasi yang baik, berbanding jumlah PMI Prov/Kab-Kota yang mengirim mengisi kuestioner penilaian kapasitas organisasi PMI	PMI Provinsi Jawa Tengah & 35 PMI Kab/Kota	36	36	36	36	36	36
Output 5.2.1.									
Terlaksananya tatakelola kepegawaian yang menyeluruh dan berorientasi pada pengembangan kompetensi staf dan kesejahteraan									
94	% PMI Kab/Kota dengan staf permanen yang digaji ≥4 orang	Markas PMI Kab/Kota dengan komposisi staf Markas tidak terbatas pada fungsi-fungsi: <ul style="list-style-type: none"> Kepala Markas Penata Keuangan Penata Administrasi Umum Penata program Layanan dan Pembinaan Staf Markas PMI Kab/Kota yang permanen adalah dengan: <ul style="list-style-type: none"> SK pengangkatan yang diterbitkan oleh PMI Kab/Kota Jabatan definitif serta uraian tugas yang jelas Gaji yang dibayarkan langsung oleh Keuangan Markas PMI Kab/Kota 	PMI Provinsi Jawa Tengah & 35 PMI Kab/Kota	36	36	36	36	36	36

TUJUAN STRATEGIS-5									
Mewujudkan PMI yang berfungsi baik, dengan Kepemimpinan yang berpedoman kuat pada Prinsip-Prinsip Dasar Gerakan Internasional PM/BSM dan tatakelola organisasi yang sinergis dalam pelaksanaan kegiatan, peraturan organisasi, sistem, dan prosedur yang berlaku.									
NO	INDIKATOR	URAIAN INDIKATOR	TARGET	TARGET PELAKSANAAN KEGIATAN					
				2021 7 Bulan	2022	2023	2024	2025	2026 4 Bulan
		Kalkulasi: Jumlah PMI Kab/Kota yang menggaji staf permanen ≥ 4 orang, berbanding dengan jumlah PMI Kab/Kota yang mengisi kuesioner penilaian kapasitas organisasi PMI.							
95	% Markas PMI disemua tingkatan memiliki ≥ 4 peraturan dasar tata kelola staf/kepegawaian	Peraturan dasar tatakelola staf/kepegawaian, antara lain meliputi, tidak terbatas pada: <ul style="list-style-type: none"> • Rekrutmen • Jenjang pangkat/ pengangkatan/ penggajian • Penilaian kinerja • Hak dan kewajiban pegawai • Kesejahteraan pegawai • Sanksi dan pemutusan hubungan kerja • Pengawasan dan pembinaan • Pensiun/Pesangon Kalkulasi: Jumlah Markas PMI yang memiliki setidaknya 4 peraturan dasar dari komponen peraturan kepegawaian, berbanding total Markas PMI Prov/Kab-Kota dan Pusat	100% dari 35 PMI kab/Kota Se Jateng	100%	100%	100%	100%	100%	100%
96	Jumlah PMI Prov/Kab-Kota melaksanakan sistim penilaian kinerja staf setiap tahunnya	Sistim penilaian kerja adalah mekanisme penilaian kinerja staf Markas yang dilakukan oleh pejabat setingkat di atasnya, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Perilaku • Disiplin • Output pekerjaan Kalkulasi: Cukup jelas	PMI Provinsi Jawa Tengah & 35 PMI Kab/Kota	36	36	36	36	36	36
97	Jumlah staf Markas PMI disemua tingkatan yang berkompeten dalam bidang manajemen	Adalah staf Markas PMI yang telah memperoleh pelatihan manajemen, setidaknya di bidang perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan, baik dari internal PMI maupun dari lembaga eksternal, dan mengelola program/kegiatan pembinaan atau pelayanan PMI setempat Kalkulasi: Jumlah staf Markas PMI yang mengelola program/kegiatan pembinaan atau pelayanan PMI setempat.	PMI Provinsi Jawa Tengah & 35 PMI Kab/Kota	36	36	36	36	36	36

TUJUAN STRATEGIS-5									
Mewujudkan PMI yang berfungsi baik, dengan Kepemimpinan yang berpedoman kuat pada Prinsip-Prinsip Dasar Gerakan Internasional PM/BSM dan tatakelola organisasi yang sinergis dalam pelaksanaan kegiatan, peraturan organisasi, sistem, dan prosedur yang berlaku.									
NO	INDIKATOR	URAIAN INDIKATOR	TARGET	TARGET PELAKSANAAN KEGIATAN					
				2021 7 Bulan	2022	2023	2024	2025	2026 4 Bulan
98	Jumlah staf Markas PMI disemua tingkatan yang berkompeten dalam bidang teknis layanan ke-PM-an	<p>Adalah staf Markas PMI yang telah memperoleh pelatihan tekis, antara lain, tidak terbatas pada pelatihan prioritas I/II/III:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan ketrampilan prioritas I mencakup assessment, pertolongan pertama dan evakuasi, pemulihan hubungan keluarga, komunikasi dan kehumasan. • Pelatihan ketrampilan pelayanan prioritas II mencakup dapur umum, pelayanan kesehatan, pelayanan ambulans, dan program dukungan psikososial. • Pelatihan ketrampilan prioritas III mencakup penampungan dan pengungsian, air dan sanitasi, distribusi dan relief. <p>Kalkulasi: Jumlah staf Markas yang memiliki setidaknya ≤ 3 jenis ketrampilan</p>	PMI Provinsi Jawa Tengah & 35 PMI Kab/Kota	36	36	36	36	36	36
99	Jumlah PMI Prov/Kab-Kota yang menggaji staf \geq UMP setempat dengan tunjangan- tunjangan lain yang relevan	<p>Adalah staf Markas PMI Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota yang memperoleh besaran gaji pokok \geqUMP setempat ditambah dengan tunjangan- tunjangan lain yang relevan untuk mendukung kinerja staf.</p> <p>Kalkulasi: Cukup jelas</p>	PMI Provinsi Jawa Tengah & 35 PMI Kab/Kota	36	36	36	36	36	36
100	Jumlah PMI Prov/Kab-Kota dan Pusat menyediakan asuransi kesejahteraan staf	<p>Asuransi Kesejahteraan staf meliputi, asuransi ketenagakerjaan dan asuransi kesehatan yang dikontribusi oleh Markas dan Staf secara proporsional.</p> <p>Kalkulasi: Jumlah PMI Prov/Kab-Kota yang menyediakan setidaknya 1(satu) jenis asuransi kesejahteraan Staf Markas.</p>	PMI Provinsi Jawa Tengah & 35 PMI Kab/Kota	36	36	36	36	36	36
Output 5.2.2									
Terlaksananya sistim dan tatakelola keuangan yang akuntabel									

TUJUAN STRATEGIS-5									
Mewujudkan PMI yang berfungsi baik, dengan Kepemimpinan yang berpedoman kuat pada Prinsip-Prinsip Dasar Gerakan Internasional PM/BSM dan tatakelola organisasi yang sinergis dalam pelaksanaan kegiatan, peraturan organisasi, sistem, dan prosedur yang berlaku.									
NO	INDIKATOR	URAIAN INDIKATOR	TARGET	TARGET PELAKSANAAN KEGIATAN					
				2021 7 Bulan	2022	2023	2024	2025	2026 4 Bulan
101	% PMI di semua tingkatan menerbitkan laporan keuangan tahunan sesuai standar PSAK 045	<p>Laporan Keuangan standar PSAK 045 (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) adalah pelaporan keuangan untuk Organisasi Nirlaba yang bertujuan untuk menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota organisasi, kreditur, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi nirlaba. Laporan tahunan sesuai PSAK 045, terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan Posisi Keuangan • Laporan aktivitas • Laporan Arus Kas • Laporan Realisasi Anggaran dan Varians • Laporan Saldo Dana Proyek & Unit Usaha • Laporan Keuangan Pokok (Buku Kas-Bank, Buku Besar, Buku Uang Muka, Buku Hutang- Piutang, Buku Penerimaan/ Penjualan, Buku Stok/Inventori) <p>Kalkulasi: Jumlah Markas PMI Prov/Kab-Kota memiliki ≥3 kriteria laporan keuangan pokok, berbanding jumlah PMI Prov/Kab-Kota yang mengirim mengisi kuestioner penilaian kapasitas organisasi PMI</p>	100% PMI Kab/Kota Se Jateng	100%	100%	100%	100%	100%	100%
102	PMI Prov/Kab- Kota dan Pusat melakukan audit eksternal setiap tiga tahun.	<p>Audit eksternal merupakan pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan secara independen oleh pihak eksternal untuk memeriksa kepatuhan terhadap ketentuan yang ditetapkan.</p> <p>Kalkulasi: Jumlah PMI Prov/Kab-Kota dan Pusat yang melaporkan pelaksanaan audit eksternal pada tahun pelaporan.</p>	PMI Provinsi Jawa Tengah & 35 PMI Kab/Kota	36	36	36	36	36	36
103	% laporan penggunaan donasi yang dipublikasikan kepada masyarakat.	<p>Laporan penggunaan donasi adalah pertanggungjawaban PMI atas penerimaan dan penggunaan donasi mitra/masyarakat yang dipublikasikan kepada masyarakat melalui media massa.</p> <p>Kalkulasi: Jumlah laporan donasi yang dipublikasikan, berbanding dengan jumlah mitra utama yang memberikan donasi</p>	100% PMI Kab/Kota Se Jateng	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Output 5.2.3									
Sistim perencanaan, monitoring-evaluasi dan pelaporan melembaga									

TUJUAN STRATEGIS-5									
Mewujudkan PMI yang berfungsi baik, dengan Kepemimpinan yang berpedoman kuat pada Prinsip-Prinsip Dasar Gerakan Internasional PM/BSM dan tatakelola organisasi yang sinergis dalam pelaksanaan kegiatan, peraturan organisasi, sistem, dan prosedur yang berlaku.									
NO	INDIKATOR	URAIAN INDIKATOR	TARGET	TARGET PELAKSANAAN KEGIATAN					
				2021 7 Bulan	2022	2023	2024	2025	2026 4 Bulan
104	PMI disemua tingkatan mengoperasikan sistim informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi	<p>Sistim Informasi Manajemen (SIM) berbasis teknologi informatika adalah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasikan data (mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, menyajikan) dalam bentuk informasi yang spesifik untuk mengidentifikasi suatu masalah, menyelesaikan masalah, dan mengevaluasi kinerja semua tahapan manajemen termasuk perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan.</p> <p>Kalkulasi: Jumlah Markas PMI yang sudah terintegrasi dalam sistim informasi manajemen PMI yang dikelola oleh PMI Pusat.</p>	PMI Provinsi Jawa Tengah & 35 PMI Kab/Kota	36	36	36	36	36	36
105	Jumlah produk SIM PMI yang diterbitkan oleh PMI Jateng	<p>Adalah hasil pengolahan data berupa informasi yang disajikan dalam bentuk statistik dashboard, infographis, fact-sheet, flyers yang dapat diakses oleh PMI disemua tingkatan yang sudah terintegrasi dalam SIM PMI.</p> <p>Kalkulasi: Jenis dan jumlah produk SIM PMI yang diterbitkan setiap bulannya</p>	PMI Provinsi Jawa Tengah & 35 PMI Kab/Kota	36	36	36	36	36	36
106	PMI disemua tingkatan memiliki rencana kerja sesuai panduan	<p>Rencana kerja Setiap tahun sesuai Panduan Perencanaan dan Pelaporan adalah rencana kerja yang menggunakan format yang ditetapkan dan memuat informasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tujuan Strategis • Outcome, indikator, dan targetnya • Output, indikator, dan targetnya • Kegiatan-kegiatan • Jumlah anggaran per kegiatan dan kategorinya <p>Kalkulasi: Jumlah PMI Prov/Kab-Kota mengirimkan dokumen perencanaan tahunan kepada PMI Pusat</p>	PMI Provinsi Jawa Tengah & 35 PMI Kab/Kota	36	36	36	36	36	36

TUJUAN STRATEGIS-5									
Mewujudkan PMI yang berfungsi baik, dengan Kepemimpinan yang berpedoman kuat pada Prinsip-Prinsip Dasar Gerakan Internasional PM/BSM dan tatakelola organisasi yang sinergis dalam pelaksanaan kegiatan, peraturan organisasi, sistem, dan prosedur yang berlaku.									
NO	INDIKATOR	URAIAN INDIKATOR	TARGET	TARGET PELAKSANAAN KEGIATAN					
				2021 7 Bulan	2022	2023	2024	2025	2026 4 Bulan
107	PMI Kab/Kota mengirim laporan semester tepat waktu	<p>Laporan semester adalah laporan yang memuat 9 indikator dasar kinerja Markas, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah PMR Mula/Madya/Wira aktif selama 6 bulan terakhir Jumlah KSR/TSR aktif selama 6 bulan terakhir Jumlah DDS aktif yang mendonor setidaknya 2 kali dalam 6 bulan terakhir Jumlah staf markas yang digaji Jumlah penerima manfaat layanan darurat bencana Jumlah penerima manfaat layanan non-darurat bencana Jumlah pendapatan per semester Jumlah belanja per semester <p>Kalkulasi: Jumlah PMI Kab/Kota yang terdokumentasi dalam aplikasi Laporan Semester</p>	PMI Provinsi Jawa Tengah & 35 PMI Kab/Kota	36	36	36	36	36	36
100	PMI disemua tingkatan menerbitkan laporan tahunan realisasi rencana kerja berorientasi pada hasil	<p>Laporan Tahunan PMI Pusat/Provinsi, Kab-Kota sesuai Panduan Perencanaan dan Pelaporan terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ringkasan Eksekutif Analisis capaian program (target vs aktual) <p>Kalkulasi: Jumlah PMI Prov/Kab-Kota dan Pusat yang mengirimkan laporan realisasi rencana kerja ke PMI Pusat</p>	PMI Provinsi Jawa Tengah & 35 PMI Kab/Kota	36	36	36	36	36	36
108	PMI disemua tingkatan melaksanakan monitoring sesuai panduan	<p>Adalah monitoring proses, hasil, serapan dana, umpan-balik dan penerima manfaat, atas <u>kegiatan spesifik (pilihan tertentu) atau proyek</u> (bantuan donor, dana mandiri), yang dilaksanakan dengan mengikuti kaidah-kaidah standar, tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> Fokus pada kebutuhan informasi Sistimatis berdasarkan indikator Mendeteksi perubahan yang tidak terduga Tepat waktu Partisipatif, melibatkan stakeholder Hasil monitoring, dilaporkan dan dibagikan <p>Kalkulasi: Jumlah PMI Prov/Kab-Kota dan Pusat yang melakukan monitoring atas kegiatan spesifik tertentu atau proyek.</p>	Aktual	36	36	36	36	36	36

TUJUAN STRATEGIS-5									
Mewujudkan PMI yang berfungsi baik, dengan Kepemimpinan yang berpedoman kuat pada Prinsip-Prinsip Dasar Gerakan Internasional PM/BSM dan tatakelola organisasi yang sinergis dalam pelaksanaan kegiatan, peraturan organisasi, sistem, dan prosedur yang berlaku.									
NO	INDIKATOR	URAIAN INDIKATOR	TARGET	TARGET PELAKSANAAN KEGIATAN					
				2021 7 Bulan	2022	2023	2024	2025	2026 4 Bulan
109	PMI disemua tingkatan melaksanakan evaluasi sesuai panduan	<p>Evaluasi adalah penilaian sistimatis dan obyektif atas kegiatan spesifik (pilihan tertentu) atau proyek (bantuan donor, dana mandiri), yang dilaksanakan pada paruh-waktu atau setelah kegiatan/proyek selesai, dengan kriteria tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Relevansi (kesesuaian dengan kebutuhan penerima manfaat atau kepentingan organisasi) • Efisiensi (penggunaan sumber daya) • Efektifitas (capaian tujuan jangka pendek, menengah) • Keberlanjutan (tindak lanjut setelah intervensi selesai) • Penilaian dampak (perubahan yang terjadi) <p>Kalkulasi: Jumlah PMI Prov/Kab-Kota dan Pusat yang melakukan evaluasi atas kegiatan spesifik tertentu atau proyek.</p>	Aktual	36	36	36	36	36	36
Output 5.3.2									
Kurikulum pelatihan nasional yang dibutuhkan oleh internal/ eksternal dimutakhirkan oleh PMI dan diakreditasi oleh lembaga nasional (Kemenkes, Kemenakertrans, BNPB)									
110	% kurikulum pelatihan termutakhirkan	<p>Kurikulum diperbaharui sesuai dengan perkembangan pelayanan PMI dan disahkan.</p> <p>Kalkulasi : Jumlah kurikulum pelatihan yang diperbaharui berbanding dengan jumlah kurikulum yang dibutuhkan (n=54)</p>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
111	Jumlah kurikulum yang memperoleh akreditasi dari lembaga yang berkompeten	<p>Adalah kurikulum pelatihan yang memenuhi kriteria ketulusan akreditasi oleh lembaga nasional seperti Kemenkes, Kemenakertrans dan BNPB.</p> <p>Kalkulasi : Cukup jelas</p>	10	1	2	2	2	2	1
Output 5.3.3									
Pelatihan-pelatihan PMI dikelola sesuai dengan panduan manajemen pelatihan									

TUJUAN STRATEGIS-5									
Mewujudkan PMI yang berfungsi baik, dengan Kepemimpinan yang berpedoman kuat pada Prinsip-Prinsip Dasar Gerakan Internasional PM/BSM dan tatakelola organisasi yang sinergis dalam pelaksanaan kegiatan, peraturan organisasi, sistem, dan prosedur yang berlaku.									
NO	INDIKATOR	URAIAN INDIKATOR	TARGET	TARGET PELAKSANAAN KEGIATAN					
				2021 7 Bulan	2022	2023	2024	2025	2026 4 Bulan
112	Laporan pelatihan PMI Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai Juknis manajemen pelatihan	Adalah laporan pelatihan internal dan eksternal yang sesuai panduan akreditasi dan manajemen pelatihan, meliputi : - Perencanaan/analisis diklat seperti: surat pemberitahuan pelatihan, kerangka acuan, jadwal, kurikulum, form monitoring, dan evaluasi pelatihan, pelaksanaan pelatihan (Pelatih, panitia, pengendali diklat) - Pelaksanaan diklat seperti: surat permohonan akreditasi pelatihan, laporan pelatihan, laporan pelatih, biodata peserta. - Pemantauan pelatihan seperti: bentuk evaluasi reaksi, pembelajar, evaluasi harian, evaluasi akhir, standart minimum kelulusan, nilai akhir, RKTL. Kalkulasi: Jumlah laporan pelatihan PMI Pusat/Prov/Kab/Kota sesuai dengan panduan akreditasi manajemen pelatihan.	36 Dokumen	6	6	6	6	6	6
Output 5.3.4									
Standart Kerja Kompetensi Nasional Indonesia (SKKNI) di Bidang Kemanusiaan merujuk perundang-undangan Kepalangmerahan tersedia dan diimplementasikan									
113	Jumlah Diklat/LSP/TUK Layanan Kemanusiaan berbasis SKKNI yang diselenggarakan oleh PMI	SKKNI adalah Standart Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan, dan / atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan. Kalkulasi: Jumlah penyelenggaraan sertifikasi/ Diklat PMI menggunakan kurikulum yang merujuk pada struktur SKKNI	Aktual	3	3	3	3	3	3

RENCANA OPERASIONAL 2021 - 2026

TUJUAN STRATEGIS-6									
Meningkatkan kapasitas PMI di semua tingkatan dalam mengelola infrastruktur material dasar (sarana-prasarana) untuk mendukung kegiatan operasional dan pelayanan									
NO	INDIKATOR	URAIAN INDIKATOR	TARGET	TARGET PELAKSANAAN KEGIATAN					
				2021 7 Bulan	2022	2023	2024	2025	2026 4 Bulan
Outcome 6.1									
Sarana prasarana dasar pendukung kegiatan operasional dan pelayanan (seperti markas, alat-alat kerja dan komunikasi, kendaraan operasional, gudang) tersedia melalui proses pengadaan, pemeliharaan dan pengelolaan yang baik.									
114	% PMI Prov/Kab- Kota dengan ketersediaan sarana prasarana pendukung kegiatan operasional dan pelayanan yang memadai	<p>Adalah Markas PMI yang memiliki sarana- parasarana pendukung operasional dan pelayanan yang memadai, antara lain tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none">Gedung Markas dengan status kepemilikan tertulis (hak milik, hak guna bangunan, sewa berbayar, pinjam-pakai, menumpang dll)Gedung Markas dengan minimum 4 ruangan terpisah (Ruang KaMarkas yang juga berfungsi sebagai ruang tamu atau tempat pertemuan, Ruang Keuangan, Ruangan kerja Staf lain-lain dan toilet ramah jender)Sarana operasional bergerak (kendaraan R-2/4)Peralatan kerja esensial, Furniture kantor, Sarana komunikasiRuangan setara tempat penampungan barangPeralatan standar layanan lapangan (perlengkapan penampungan, peralatan DU, peralatan PP/Evakuasi, APD) <p>Kalkulasi: Jumah Markas PMI Prov/Kab-Kota yang memenuhi kriteria per uraian indikator, berbanding dengan total Markas PMI Prov/Kab-Kota</p>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Output 6.1.1									
Tersedianya sarana prasarana Markas untuk mendukung kegiatan rutin									
115	PMI Prov/Kab/Kota memiliki setidaknya tiga jenis sarana prasarana dasar operasional Markas.	<p>Sarana prasarana dasar operasional markas, tidak terabtas pada:</p> <ul style="list-style-type: none">Meja, kursi, lemari/rakKomputer dengan internetTelepon, FaxRadio Komunikasi (tetap/mobile)Ruangan setara tempat penampungan barang <p>Kalkulasi: Jumlah Markas PMI Kab/Kota yang memiliki setidaknya 3 jenis dari daftar sarana-prasarana tersebut diatas</p>	35 PMI Kab/Kota dan PMI Prov. Jawa Tengah	36	36	36	36	36	36

TUJUAN STRATEGIS-6																																				
Meningkatkan kapasitas PMI di semua tingkatan dalam mengelola infrastruktur material dasar (sarana-prasarana) untuk mendukung kegiatan operasional dan pelayanan																																				
NO	INDIKATOR	URAIAN INDIKATOR	TARGET	TARGET PELAKSANAAN KEGIATAN																																
				2021 7 Bulan	2022	2023	2024	2025	2026 4 Bulan																											
116	PMI Provinsi/Kab- Kota memiliki posko yang aktif/berfungsi.	<p>Adalah PMI Prov/Kab-Kota yang mengoperasikan Posko 24/7 dengan kelengkapan antara lain, tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none">• Radio komunikasi (stationer), yang berizin• Radio komunikasi (portable), yang berizin• Radio komunikasi (mobile), yang berizin <p>• Telpon, Fax, Komputer</p> <ul style="list-style-type: none">• Data kontak person (internal dan eksternal)• Data daerah rawan bencana• Data kejadian bencana/konflik/krisis kesehatan <p>Kalkulasi: Markas PMI Prov/Kab-Kota yang beroperasi 24/7 dengan setidaknya 5 item kelengkapan dari daftar tersebut diatas.</p>	35 PMI Kab/Kota dan PMI Prov. Jawa Tengah	36	36	36	36	36	36																											
117	Posko PMI Kab/Kota tanggap mengirim laporan kejadian bencana	<p>Adalah laporan awal kejadian bencana dan laporan kejadian yang diperbaharui (update) yang dilaporkan oleh Posko PMI Kab/Kota kepada PMI Provinsi atau PMI Pusat.</p> <p>Kalkulasi:</p> <ul style="list-style-type: none">• Jumlah Posko PMI Kab/Kota yang mengirim laporan situasi bencana, laporan awal dan laporan diperbaharui.• Jumlah dan jenis kejadian bencana yang dilaporkan	35 PMI Kab/Kota dan PMI Prov. Jawa Tengah	36	36	36	36	36	36																											
Output 6.1.2																																				
Sistim logistik bantuan kemanusiaan berfungsi sesuai SOP mekanisme dukungan regional/zonasi																																				
118	Gudang strategis PMI memiliki persediaan minimum jenis barang bantuan prioritas	<p>Adalah gudang regional dan gudang zonasi/provinsi yang didisain untuk mobilisasi bantuan logistic operasi bencana melalui mekanisme dukungan regional/zonasi.</p> <p>Persediaan minimum jenis barang bantuan prioritas, antara lain, tidak terbatas pada:</p> <table><thead><tr><th></th><th>Regional</th><th>Zonasi</th></tr></thead><tbody><tr><td>Family Kit (unit)</td><td>2000</td><td></td></tr><tr><td>Hygine Kit (unit)</td><td>2000</td><td></td></tr><tr><td>Terpauline (pcs)</td><td>2000</td><td>200</td></tr><tr><td>Selimput (pcs)</td><td>10000</td><td>200</td></tr><tr><td>Tandon Air</td><td>100</td><td>10</td></tr><tr><td>Jerry Can 10L (unit)</td><td></td><td>200</td></tr><tr><td>Ember</td><td></td><td>100</td></tr><tr><td>Tikar (pcs)</td><td></td><td>100</td></tr></tbody></table>		Regional	Zonasi	Family Kit (unit)	2000		Hygine Kit (unit)	2000		Terpauline (pcs)	2000	200	Selimput (pcs)	10000	200	Tandon Air	100	10	Jerry Can 10L (unit)		200	Ember		100	Tikar (pcs)		100	1	1	1	1	1	1	1
	Regional	Zonasi																																		
Family Kit (unit)	2000																																			
Hygine Kit (unit)	2000																																			
Terpauline (pcs)	2000	200																																		
Selimput (pcs)	10000	200																																		
Tandon Air	100	10																																		
Jerry Can 10L (unit)		200																																		
Ember		100																																		
Tikar (pcs)		100																																		

TUJUAN STRATEGIS-6									
Meningkatkan kapasitas PMI di semua tingkatan dalam mengelola infrastruktur material dasar (sarana-prasarana) untuk mendukung kegiatan operasional dan pelayanan									
NO	INDIKATOR	URAIAN INDIKATOR	TARGET	TARGET PELAKSANAAN KEGIATAN					
				2021 7 Bulan	2022	2023	2024	2025	2026 4 Bulan
		Kalkulasi: Jumlah Gudang Strategis PMI yang melaporkan persediaan barang pada awal tahun berjalan.							
119	Jumlah operasi kedaruratan nasional PMI yang memperoleh pasokan barang dari gudang strategis PMI	Operasi kedaruratan PMI adalah kegiatan tanggap darurat bencana, krisis kesehatan dan krisis kemanusiaan lainnya yang memperoleh dukungan bantuan logistik PMI Pusat. Pasokan dari gudang strategis PMI adalah jenis dan jumlah items barang yang didistribusikan dari gudang regional/zonasi provinsi. Kalkulasi: Semua operasi kedaruratan yang memperoleh pasokan barang bantuan dari gudang strategis PMI.	60	10	10	10	10	10	10
Output 6.1.3									
Tersedianya sarana prasarana dan perangkat pendukung layanan kebencanaan, krisis kesehatan dan krisis kemanusiaan lainnya yang berfungsi baik dan memenuhi standard akuntabilitas.									
120	Frekuensi mobilisasi alat utama sistim kedaruratan untuk mendukung operasi bencana	Alat utama sistim (ALUTSIS) pendukung operasi kedaruratan, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Armada truk tanki air • Armada truk ringan • Kendaraan penjelajah (MPV) • Kendaraan ambulans • Perahu karet evakuasi • Set peralatan PP korban massal • Set peralatan APD Satgana • Set peralatan WASH/penjernih air • Set peralatan WASH/toilet darurat • Set peralatan RS lapangan • Set peralatan IT-Telekom darurat • Set Gudang lapangan (rubhall) • Set peralatan kerja (perkakas) lapangan Kalkulasi: Jumlah kegiatan mobilisasi ALUTSIS Kedaruratan untuk mendukung operasi bencana selama tahun berjalan, terdiri dari jenis dan jumlah items ALUTSIS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

TUJUAN STRATEGIS-6									
Meningkatkan kapasitas PMI di semua tingkatan dalam mengelola infrastruktur material dasar (sarana-prasarana) untuk mendukung kegiatan operasional dan pelayanan									
NO	INDIKATOR	URAIAN INDIKATOR	TARGET	TARGET PELAKSANAAN KEGIATAN					
				2021 7 Bulan	2022	2023	2024	2025	2026 4 Bulan
121	PMI Provinsi memiliki setidaknya lima alat pendukung operasional pelayanan darurat.	<p>PMI Provinsi yang memiliki peralatan standard pelayanan PB yang dapat mendukung kebutuhan operasional Tim Respon bencana, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perlengkapan DU lengkap untuk 500 orang • Perlengkapan PP (untuk Individu atau Tim) • Perlengkapan Evakuasi korban Korban (ambulan, tandu) • Perlengkapan keamanan dan keselamatan kerja (pelampung,masker, kacamata debu, helmet, sarung tangan, jas hujan) • Tenda Penampungan sementara + alat kelengkapannya • Alat-alat lapangan (Pacul, Sekop, Palu, Tali- temali) • Truck Pengangkut (apabila belum memiliki dimungkinkan dengan pra-perjanjian sewa) <p>• Kendaraan Operasional untuk personil.</p> <p>• Unit ambulans gadar/transportasi yang sesuai dengan panduan pelayanan ambulans PMI</p> <p>Kalkulasi: Jumlah Markas PMI Provinsi yang memiliki 5 items dari daftar peralatan standar PB diatas.</p>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
122	PMI Kabupaten/Kota memiliki setidaknya tiga jenis perlengkapan tim pelayanan darurat.	<p>PMI Kabupaten/Kota yang memiliki peralatan standard pelayanan PB yang dapat mendukung kebutuhan operasional Tim Respon bencana, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perlengkapan DU lengkap untuk 500 orang • Perlengkapan PP (untuk Individu atau Tim) • Perlengkapan Evakuasi korban Korban (ambulan, tandu) • Perlengkapan keamanan dan keselamatan kerja (pelampung, masker, kacamata debu, helmet, sarung tangan, jas hujan) • Tenda Penampungan sementara + alat kelengkapannya • Alat-alat lapangan (Pacul, Sekop, Palu, Tali- temali) • Truck Pengangkut (apabila belum memiliki dimungkinkan dengan pra-perjanjian sewa) • Kendaraan Operasional untuk personil. • Unit ambulans gadar/transportasi yang sesuai dengan panduan pelayanan ambulans PMI <p>Kalkulasi: Jumlah Markas PMI Kab/Kota yang memiliki 3 items dari daftar peralatan standar PB diatas.</p>	35 PMI Kab/Kota	6	6	6	6	6	5

TUJUAN STRATEGIS-6									
Meningkatkan kapasitas PMI di semua tingkatan dalam mengelola infrastruktur material dasar (sarana-prasarana) untuk mendukung kegiatan operasional dan pelayanan									
NO	INDIKATOR	URAIAN INDIKATOR	TARGET	TARGET PELAKSANAAN KEGIATAN					
				2021 7 Bulan	2022	2023	2024	2025	2026 4 Bulan
Output 6.1.4:									
Sarana-prasarana Diklat milik PMI tumbuh dan berkembang									
123	Jumlah PMI Provinsi Jateng dengan sarana-prasarana Diklat PMI yang memenuhi standar minimum fasilitas diklat	<p>Standar fasilitas standar sarana-prasarana Diklat antara lain tidak terbatas pada :</p> <ul style="list-style-type: none">Memiliki status hukum (terpisah dari Markas)Gedung diklat (ruang belajar/in door, akomodasi, area kegiatan luar ruang/out door)Ruangan setara kelas dengan kapasitas 30 orangMedia peraga pelatihan (cetak, audio visual)Furnitures (kantor, kelas, ruang akomodasi)Perlengkapan kelas, media belajarPerlengkapan kantor (computer, printer, mesin tik)Perlengkapan recording (camera, handy-cam)Memiliki rencana pengembangan jangka panjang (bila dirancang untuk sumber pendapatan) <p>Kalkulasi: Jumlah Markas PMI yang mengoperasikan sarana- prasarana Diklat memiliki setidaknya 3 items dari daftar tersebut diatas</p>	1	1	1	1	1	1	1
Outcome 6.2									
Infrastruktur dasar teknologi informasi dan Komunikasi (TIK) PMI disemua tingkatan tersedia dan dikelola dengan baik									
124	% PMI Prov/Kab- Kota menggunakan alamat email resmi (corporate) PMI	<p>Institusi PMI adalah Markas PMI Pusat/Prov/Kab- Kota, UDD Pusat/Prov/Kab-Kota, termasuk UPT PMI yang telah mengimplementasikan IT-Telekom System yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none">Menggunakan Email Corporate (institusi PMI@pmi.or.id) dan Tata cara penggunaannyaMenggunakan Sistim Informasi dan Komunikasi PMI <p>Kalkulasi: Jumlah institusi PMI yang mengoperasikan Sistim Informasi dan Komunikasi PMI berbanding dengan total PMI Prov/Kab-Kota</p>	35 PMI Kab/Kota dan PMI Prov. Jawa Tengah (100%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Output 6.2.1									
Tersedianya infrastruktur dasar teknologi informasi dan komunikasi (TIK) PMI di semua tingkatan									

TUJUAN STRATEGIS-6									
Meningkatkan kapasitas PMI di semua tingkatan dalam mengelola infrastruktur material dasar (sarana-prasarana) untuk mendukung kegiatan operasional dan pelayanan									
NO	INDIKATOR	URAIAN INDIKATOR	TARGET	TARGET PELAKSANAAN KEGIATAN					
				2021 7 Bulan	2022	2023	2024	2025	2026 4 Bulan
125	Jumlah PMI Prov/Kab-Kota memiliki akses internet	PMI Prov/Kab-kota memiliki perangkat dasar pendukung IT-Telekom sistem yang terdiri : <ul style="list-style-type: none"> • Komputer • Printer • Jaringan internet • Koneksi Internet umum Kalkulasi: Jumlah PMI Prov/Kab-Kota yang memiliki perangkat dasar pendukung IT-Telekom	35 PMI Kab/Kota dan PMI Prov. Jawa Tengah (100%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Output 6.2.2									
Kapasitas Markas PMI disemua tingkatan dalam tatakelola informasi meningkat									
126	Personil Markas PMI semua tingkatan yang memperoleh pelatihan teknologi informasi dan komunikasi	Pelatihan teknologi informatika adalah pelatihan yang diinisiasi oleh PMI Pusat, antara lain, tidak terbatas pada: <ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan tatakelola data dan informasi • Pelatihan penggunaan SIM PMI • Pelatihan teknis lainnya untuk mendukung pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi Kalkulasi: Jumlah personil Markas yang memperoleh pelatihan TI tingkat nasional.	35 PMI Kab/Kota dan PMI Prov. Jawa Tengah (100%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%

RENCANA OPERASIONAL 2021 - 2026

TUJUAN STRATEGIS-7									
Meningkatkan kemandirian organisasi PMI secara berkesinambungan melalui kerjasama strategis disemua tingkataninisiatif Pengembangan Sumber Daya yang innovative									
NO	INDIKATOR	URAIAN INDIKATOR	TARGET	TARGET PELAKSANAAN KEGIATAN					
				2021 7 Bulan	2022	2023	2024	2025	2026 4 Bulan
Outcome 7.1:									
Hubungan kerjasama PMI di semua tingkatan dengan pemerintah, sektor swasta, mitra gerakan, organisasi, lembaga donor nasional dan internasional, masyarakat umum serta pemangku kepentingan lainnya menguat di semua tingkatan.									
127	Jumlah mitra yang memiliki kerja sama formal lebih dari satu tahun dengan PMI Prov/Kab-Kota	Mitra PMI adalah lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah, sektor publik, swasta, mitra gerakan, lembaga donor dan pemangku kepentingan lainnya yang bekerjasama dengan PMI berdasarkan kesepakatan tertulis dan berkelanjutan. Kalkulasi: Kerjasama formal PMI-Mitra dengan durasi lebih dari satu tahun.	10 Mitra Kerja	2	2	2	2	1	1
Output 7.1.1.									
Kesepakatan tertulis antara PMI dengan pemerintah, sektor publik, swasta, mitra gerakan, organisasi, lembaga donor nasional dan internasional, serta pemangku kepentingan lainnya tersedia dan diimplementasikan di PMI semua tingkatan.									
128	Jumlah kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh PMI Prov/ Kab/Kota bersama Mitra	Kesepakatan tertulis dan kesepakatan lain-lain yang setara adalah kesepakatan formal yang menjadi landasan hukum kerjasama PMI dan Mitra, yang memuat ketentuan atau rujukan isi kerjasama, antara lain, tidak terbatas pada: <ul style="list-style-type: none">• Tujuan kerjasama• Ruang lingkup kerjasama• Durasi kerjasama• Pembagian tugas dan tanggungjawab para pihak• Monitoring, evaluasi dan delaporan Kalkulasi: Total kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh PMI Prov/Kab-Kota	10 MoU atau PKS	1	2	2	2	2	1
129	Jumlah PMI Kab-Kota yang mengirim laporan hasil kerjasama kepada PMI setingkat diatasnya	Laporan kinerja hasil kerjasama yang memuat capaian-capaian kerjasama PMI-Mitra yang merujuk pada tujuan dan ruang lingkup kerjasama. Kalkulasi: Cukup jelas	10 dokumen laporan	2	2	2	2	2	2
130	%PMI Kab-Kota yang melaporkan penerimaan tahunan ≥500 juta rupiah	Cukup jelas Kalkulasi: Jumlah PMI Kab-Kota dengan pendapatan ≥500 juta rupiah berbanding dengan jumlah PMI Kab-Kota yang melapor	100% PMI Kab-Kota se Jateng melaporkan penerimaan tahunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

TUJUAN STRATEGIS-7									
Meningkatkan kemandirian organisasi PMI secara berkesinambungan melalui kerjasama strategis disemua tingkataninisiatif Pengembangan Sumber Daya yang innovative									
NO	INDIKATOR	URAIAN INDIKATOR	TARGET	TARGET PELAKSANAAN KEGIATAN					
				2021 7 Bulan	2022	2023	2024	2025	2026 4 Bulan
131	%PMI Kab/Kota yang melaporkan penerimaan tahunan Pemerintah ≥ 300 juta rupiah	Cukup jelas Kalkulasi: Jumlah PMI Kab/Kota dengan pendapatan ≥ 300 juta rupiah berbanding dengan jumlah PMI Kab/Kota yang melapor.	100% PMI Kab-Kota se Jateng melaporkan penerimaan tahunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Output 7.1.2.									
Terlaksananya inisiatif penggalangan masyarakat untuk mendukung kegiatan kemanusiaan PM									
132	% PMI Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan Bulan Dana	Adalah kegiatan pengumpulan dana masyarakat dengan izin dari lembaga Pemerintah yang berwenang dan dilaksanakan pada periode tertentu saja. Kalkulasi: Jumlah PMI Kab/Kota yang melaporkan kegiatan Bulan Dana berbanding dengan jumlah PMI Kab/Kota se Indonesia.	100 % PMI Kab-Kota melaksanakan Bulan Dana	100%	100%	100%	100%	100%	100%
133	Jumlah PMI Kab-Kota yang melaporkan kegiatan penggalangan dana	Laporan penggalangan dana adalah laporan rekapitulasi dana yang didapatkan PMI pada setiap event penggalangan dana, baik bersumber dari individu/kelompok individu, lembaga usaha/korporasi, lembaga donor dan lain-lain yang selanjutnya dipublikasi ke masyarakat melalui laporan atau media massa. Kalkulasi: Jumlah PMI Kab-Kota dan Prov yang mengirim laporan kegiatan dan hasil penggalangan dana.	35 PMI Kab/Kota melapor	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Outcome 7.2									
Kapasitas pengembangan sumber daya dalam rangka menggalang partisipasi mitra dan masyarakat untuk mendukung keberlangsungan program meningkat									
134	Jumlah PMI Prov/Kab-Kota dengan inisiatif diversifikasi sumber pendapatan	Inisiatif diversifikasi sumber pendapatan adalah berbagai upaya PMI Pusat/Prov/Kab-Kota untuk meningkatkan pendapatan tidak terikat, antara lain, tidak terbatas pada: <ul style="list-style-type: none"> Promosi kegiatan kepalangmerahan Pendirian unit usaha dengan status hukum terpisah Komersialisasi sarana-prasarana Jasa pelatihan khas ke-PM-an Kerjasama strategis Donasi online Kegiatan innovative lainnya 	18 Milyard						

TUJUAN STRATEGIS-7									
Meningkatkan kemandirian organisasi PMI secara berkesinambungan melalui kerjasama strategis disemua tingkataninisiatif Pengembangan Sumber Daya yang innovative									
NO	INDIKATOR	URAIAN INDIKATOR	TARGET	TARGET PELAKSANAAN KEGIATAN					
				2021 7 Bulan	2022	2023	2024	2025	2026 4 Bulan
		Kalkulasi: Cukup Jelas							
Output 7.2.1									
Strategi peningkatan kapasitas Pengembangan Sumber Daya tersedia dan diimplementasikan oleh PMI disemua tingkatan									
135	Jumlah stakeholders PMI Prov/Kab-Kota yang terhubung dengan inisiatif diversifikasi sumber pendapatan	<p>Stakeholders terhubung dengan inisiatif diversifikasi sumber pendapatan adalah jejaring untuk komunikasi, koordinasi, konsultasi dan kerjasama pengembangan usaha, antara lain, tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat umum • Lembaga Pemerintah • Lembaga usaha/korporasi potensial • Lembaga usaha berbasis online • Donatur lokal • Pasar potensial yaitu sasaran produk usaha, segmen produk informasi <p>Kalkulasi: Jumlah stakeholders tingkat local dan nasional yang terdata (dalam database) oleh PMI Jateng</p>	PMI Provinsi dan 35 PMI Kab/Kota Se Jateng Th 2021	36	36	36	36	36	36
Output 7.2.2									
Inisiatif Pengembangan Sumber Daya yang inovatif terdokumentasi, didiseminasikan dan direplikasi/duplikasi oleh unit PMI lainnya									
136	Jumlah inisiatif Pengembangan Sumber Daya yang inovatif yang disosialisasikan PMI Prov/Kab dan Kota	<p>Inisiatif Pengembangan Sumber Daya yang inovatif adalah berbagai upaya untuk menciptakan landasan, sumber daya, ruang, peluang untuk memelihara keberlanjutan program dan ketersediaan dana, antara lain tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membangun akseptabilitas organisasi melalui kegiatan sosialisasi, promosi, membina jejaring • Membangun akses yang permanen terhadap sumber-sumber Pemerintah melalui advokasi, integrasi dengan program Pemda, kerjasama strategis 	PMI Provinsi dan 35 PMI	36	36	36	36	36	36

TUJUAN STRATEGIS-7									
Meningkatkan kemandirian organisasi PMI secara berkesinambungan melalui kerjasama strategis disemua tingkataninisiatif Pengembangan Sumber Daya yang innovative									
NO	INDIKATOR	URAIAN INDIKATOR	TARGET	TARGET PELAKSANAAN KEGIATAN					
				2021 7 Bulan	2022	2023	2024	2025	2026 4 Bulan
		<ul style="list-style-type: none"> Kreasi/inovasi yang atraktif untuk menggalang dukungan berupa partisipasi masyarakat, sumber daya masyarakat (dana, sarpras, fasilitasi, koneksi dll) <p>Kalkulasi: Jumlah inisiatif Pengembangan Sumber Daya inovatif yang dilaporkan PMI Prov/Kab-Kota kepada Divisi Pengembangan Sumber Daya & Kerjasama PMI Pusat</p>	Kab/Kota						
Output 7.2.3									
Tersedianya mekanisme berbagi pengalaman inisiaif Pengembangan Sumber Daya									
137	Jumlah kunjungan bimbingan teknis Pengembangan Sumber Daya yang dikelola oleh PMI Jateng	<p>Kunjungan bimbingan teknis adalah upaya membangun kapasitas Pengembangan Sumber Daya PMI Prov/Kab-Kota dengan kegiatan, antara lain tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pendampingan tatakelola inisiatif diversifikasi Fasilitasi hubungan dengan Mitra lokal <p>Kalkulasi: Cukup jelas</p>	PMI Provinsi dan 35 PMI Kab/Kota	35	35	35	35	35	35
138	Jumlah kunjungan studi banding yang didokumentasikan oleh PMI Jateng	<p>Kunjungan antar PMI Kab-Kota dengan pembelajaran yang dicatat dan disosialisasikan oleh bidang Pengembangan Sumber daya & Organisasi PMI Prov.</p> <p>Kalkulasi: Cukup jelas</p>	PMI Provinsi dan 35 PMI Kab/Kota	35	35	35	35	35	35